

RANCANGAN AKHIR

RENCANA STRATEGIS
2025-2029

DINAS PERIKANAN
KOTA TARA KAN

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan Kota Tarakan Tahun 2025–2029 disusun sebagai dokumen perencanaan jangka menengah perangkat daerah yang memuat arah kebijakan, tujuan, sasaran, indikator kinerja, program, dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Renstra ini berfungsi sebagai pedoman bagi Dinas Perikanan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan secara terarah, terukur, efektif, dan selaras dengan kebijakan pembangunan daerah maupun nasional.

Penyusunan Renstra berlandaskan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan Renstra Perangkat Daerah. Dokumen ini juga mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tarakan Tahun 2025–2029, serta diselaraskan dengan Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024–2029 dan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025–2029.

Seluruh analisis, kebijakan, dan strategi yang termuat dalam Renstra ini dirumuskan berdasarkan evaluasi capaian kinerja periode 2020–2024 serta memperhatikan kondisi aktual sektor perikanan di Kota Tarakan. Dengan demikian, dokumen ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga berbasis data (*evidence-based planning*), kontekstual, dan berorientasi pada keberlanjutan.

Dinas Perikanan Kota Tarakan memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah, khususnya Tujuan 3 (Terwujudnya pemerataan pertumbuhan ekonomi) melalui Sasaran S7 (Meningkatnya pertumbuhan dan stabilitas ekonomi), serta Tujuan 4 (Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan)

melalui Sasaran S10 (Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah). Oleh karena itu, arah kebijakan dan strategi dalam dokumen ini difokuskan pada peningkatan produktivitas subsektor perikanan tangkap, perikanan budidaya, serta pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, dengan tata kelola yang akuntabel, partisipatif, dan berbasis hasil (*result-oriented governance*).

Ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi, masukan, dan dukungan dalam penyusunan Renstra ini, khususnya kepada Bappeda Kota Tarakan, perangkat daerah terkait, akademisi, asosiasi perikanan, serta jajaran Dinas Perikanan Kota Tarakan.

Akhirnya, besar harapan kami agar Renstra ini dapat menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan sektor perikanan secara konsisten, sinergis, dan berkelanjutan, sekaligus menjadi instrumen akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perikanan di Kota Tarakan.

Tarakan, September 2025
Kepala Dinas Perikanan
Kota Tarakan



Drs. Ardiansyah
NIP. 196707151986091001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....i

DAFTAR ISI iii

DAFTAR GAMBARv

DAFTAR TABELvi

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Dasar Hukum 3

1.3. Maksud dan Tujuan 5

1.4. Sistematika Penulisan..... 5

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH..... 7

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah 7

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah 7

2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah 13

2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 19

2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan 26

2.1.5. Mitra Kerja Perangkat Daerah dalam Memberikan Layanan..... 27

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah..... 28

2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah..... 29

2.2.2. Isu Strategis..... 30

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 43

3.1. Tujuan dan Sasaran..... 43

3.2. Strategi dan Arah Kebijakan..... 45

3.2.1 Strategi Perangkat Daerah..... 45

3.2.2 Arah Kebijakan Perangkat Daerah 48

3.2.3 Pentahapan Renstra Perangkat Daerah..... 50

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN..... 52

4.1. Program, Kegiatan, Subkegiatan Perangkat Daerah 52

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan 66

4.2.1. Indikator Kinerja Utama (IKU)..... 66

4.2.2. Indikator Kinerja Kunci (IKK) 69

BAB V PENUTUP 74

5.1. Kesimpulan 74

5.2. Kaidah Pelaksanaan 74

5.3. Pengendalian dan Evaluasi 75

DAFTAR GAMBAR

			Halaman
Gambar 1.1	Proses Penyusunan Renstra Perangkat Daerah		2
Gambar 1.2	Hubungan Dokumen RPJMD dengan Dokumen Renstra Perangkat Daerah		3
Gambar 1.3	Hubungan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Daerah		3
Gambar 2.1	Bagan Struktur Organisasi Dinas Perikanan Kota Tarakan		11
Gambar 2.2	Struktur Organisasi Penyesuaian Dinas Perikanan Kota Tarakan		13
Gambar 2.3	Tren Rasio Capaian Pelayanan Dinas Perikanan Kota Tarakan (2020-2024)		23

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 2.1	Jumlah Pegawai Menurut Kelompok Umur	14
Tabel 2.2	Jumlah Pegawai Menurut Golongan	15
Tabel 2.3	Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan	15
Tabel 2.4	Jumlah Pegawai Menurut Jabatan	16
Tabel 2.5	Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin	17
Tabel 2.6	Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin & Jabatan	18
Tabel 2.7	Jumlah Aset/Modal Menurut Jenis Pada Dinas Perikanan Tahun 2024	18
Tabel 2.8	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kota Tarakan	22
Tabel 2.9	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kota Tarakan	25
Tabel 2.10	Mitra Perangkat Daerah dan Dukungan Kinerja	29
Tabel 2.11	Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dinas Perikanan Kota Tarakan	31
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah	46
Tabel 3.2	Penentuan Strategi Dinas Perikanan Kota Tarakan	47
Tabel 3.3	Arah dan Kebijakan Perangkat Daerah	49
Tabel 3.4	Pentahapan Renstra Perangkat Daerah	51
Tabel 4.1	Perumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Perikanan Kota Tarakan	54
Tabel 4.2	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Perikanan Kota Tarakan	63
Tabel 4.3	Sub Kegiatan Prioritas	65
Tabel 4.4	Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perikanan	69
Tabel 4.5	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Perikanan Kota Tarakan	73

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan Kota Tarakan Tahun 2025–2029 merupakan amanat dari sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029, setiap perangkat daerah diwajibkan menyusun dokumen perencanaan lima tahunan sebagai acuan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan secara efektif, efisien, dan terarah.

Renstra Dinas Perikanan ini disusun sebagai bagian dari dokumen turunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tarakan Tahun 2025–2029, yang memuat visi, misi, dan program prioritas Kepala Daerah terpilih. Renstra ini menjadi pedoman dalam merumuskan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan pembangunan sektor kelautan dan perikanan di Kota Tarakan selama lima tahun ke depan, dengan fokus pada peningkatan produktivitas, keberlanjutan sumber daya, serta peningkatan daya saing.

Mengikuti pendekatan perencanaan berbasis kinerja sebagaimana diamanatkan dalam Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025, penyusunan dokumen ini dilakukan dengan prinsip keterpaduan, keterukuran, dan berorientasi pada capaian hasil. Oleh karena itu, Renstra ini memuat indikator kinerja utama (IKU), indikator kinerja kunci (IKK), serta indikator kegiatan dan subkegiatan yang menjadi dasar dalam proses pengendalian dan evaluasi pembangunan.

Selain sebagai instrumen perencanaan, Renstra ini juga berfungsi sebagai dasar penyusunan dokumen perencanaan tahunan, yaitu Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA)

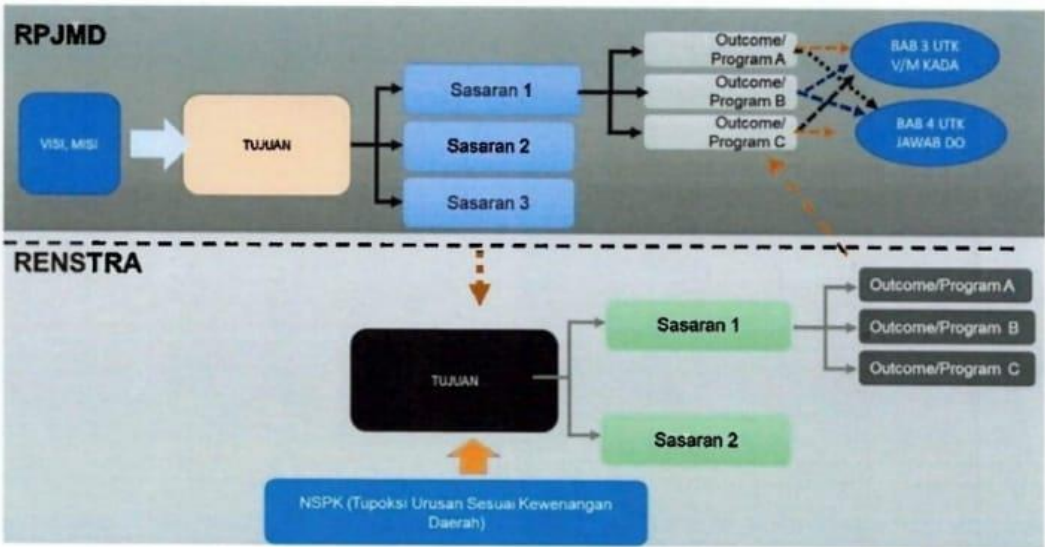
perangkat daerah. Dengan demikian, Renstra menjadi jembatan antara proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta evaluasi program secara terpadu.

Proses penyusunan Renstra dilaksanakan secara sistematis dan partisipatif, dengan mempertimbangkan kondisi aktual, tantangan strategis, serta arah kebijakan pembangunan nasional, provinsi, dan kota. Tahapan penyusunan Renstra Dinas Perikanan Kota Tarakan digambarkan pada Gambar 1.1.

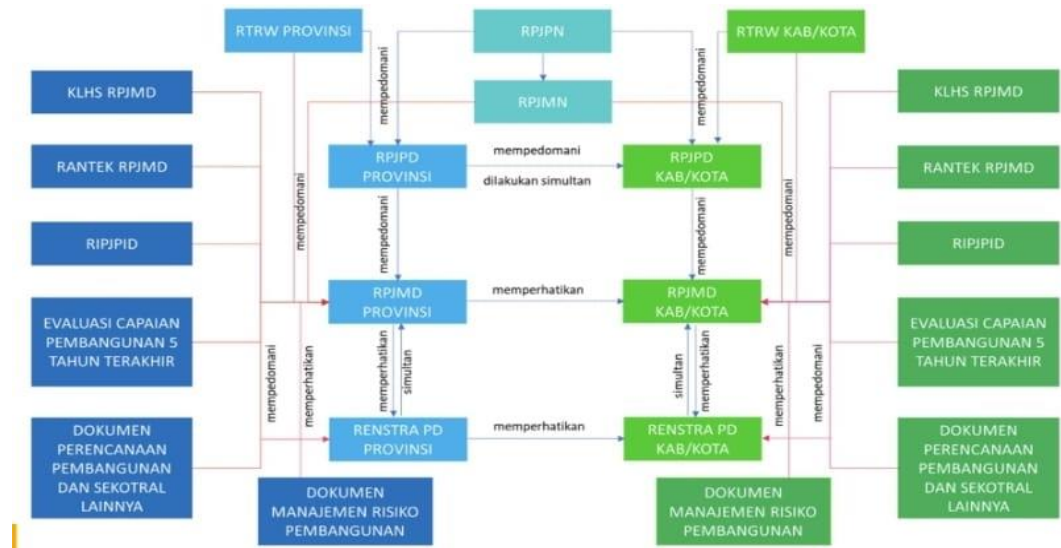
Kegiatan		Bulan ke-n						Keterangan (sejak pelantikan)
		B-1	B-2	B-3	B-4	B-5	B-6	
PERSIAPAN PENYUSUNAN RPJMD DAN RENSTRA PD	Pembentukan Tim Penyusun RPJMD dan Renstra PD							
	Orientasi Penyusunan RPJMD dan Renstra PD							
	Penyiapan Agenda Kerja							
	Penyiapan Data dan Informasi							
PENYUSUNAN SUBSTANSI RPJMD KAB/KOTA	Pembahasan Visi dan Misi secara Teknokratis							
	Penyusunan Ranwal							
	Konsultasi Publik							
	Penyampaian Ranwal ke DPRD							Paling lambat 40 hari
	Pembahasan dan Kesepakatan							Dibahas dalam 10 hari kerja
	Konsultasi Ranwal ke Gubernur							
	Penyusunan Rancangan Musrenbang							Paling lambat 75 hari
	Penyusunan Rankhir Revisi APIP							Dilakukan dalam 5 hari kerja
PROSES PENETAPAN RPJMD KAB/KOTA	Penyampaian Ranperda kepada DPRD							Paling lambat 90 hari
	Pembahasan dengan DPRD							
	Persetujuan Bersama							Paling lambat 40 hari sebelum penetapan RPJMD
	Evaluasi Ranperda RPJMD							Paling lambat 5 bulan
	Penetapan Perda RPJMD							Paling lambat 6 bulan (Peraturan daerah tentang RPJMD Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029 ditetapkan setelah penetapan RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029 atau paling lambat 6 (enam) bulan setelah kepala daerah dan wakil kepala daerah dilantik)

Gambar 1. 1 Proses Penyusunan Renstra Perangkat Daerah

Selanjutnya, hubungan antara dokumen RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah, serta keterkaitannya dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah, dijelaskan dalam Gambar 1.2 dan Gambar 1.3.



Gambar 1. 2 Hubungan Dokumen RPJMD dengan Dokumen Renstra Perangkat Daerah



Gambar 1. 3 Hubungan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Daerah

1.2. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 - 2029;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2024 tentang RPJPD Kota Tarakan Tahun 2025–2045;
14. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 2 Tahun 2025 tentang RPJMD Kota Tarakan Tahun 2025–2029;
16. Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 75 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan;
17. Surat Keputusan Wali Kota Nomor 100.3.3.3/HK-IV/241/2025 tentang Tim Penyusun Renstra Perangkat Daerah Dinas Perikanan.

1.3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Penyusunan Renstra Dinas Perikanan Kota Tarakan Tahun 2025–2029 dimaksudkan untuk menyediakan dokumen perencanaan strategis yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan secara sistematis, terukur, dan berorientasi hasil.

b. Tujuan

Penyusunan Renstra ini bertujuan untuk:

1. Menjabarkan tujuan dan sasaran pembangunan sektor perikanan Kota Tarakan yang selaras dengan RPJMD dan NSPK;
2. Menyediakan arah kebijakan, strategi, dan prioritas pembangunan yang terukur dan berbasis kinerja (IKU dan IKK);
3. Mengintegrasikan perencanaan dan penganggaran dalam penyusunan Renja PD dan RKA tahunan;
4. Menjadi dasar evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan perikanan berdasarkan;
5. Mendukung penguatan pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat perikanan di Kota Tarakan.

1.4. Sistematika Penulisan

Dokumen Renstra Dinas Perikanan Kota Tarakan Tahun 2025–2029 disusun mengacu pada Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025. Secara sistematis, dokumen ini memuat lima bab utama sebagai berikut:

- **Bab I – Pendahuluan:** berisi latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

- **Bab II – Gambaran Pelayanan, Permasalahan, dan Isu Strategis:** memuat deskripsi pelayanan Dinas Perikanan, termasuk tugas dan fungsi, struktur organisasi, sumber daya, capaian kinerja, serta permasalahan dan isu strategis.
- **Bab III – Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan:** menjelaskan tujuan dan sasaran pembangunan sektor perikanan beserta strategi dan arah kebijakan untuk mencapainya.
- **Bab IV – Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Urusan:** menguraikan program dan kegiatan prioritas Dinas Perikanan beserta indikator kinerja, target, dan pagu indikatif.
- **Bab V – Penutup:** berisi kesimpulan, kaidah pelaksanaan, serta mekanisme pengendalian dan evaluasi Renstra.

Dengan sistematika tersebut, Renstra ini diharapkan menjadi dokumen yang komprehensif dan operasional dalam mengarahkan pembangunan sektor kelautan dan perikanan secara terencana, akuntabel, dan berkelanjutan di Kota Tarakan.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Dinas Perikanan Kota Tarakan merupakan lembaga teknis daerah yang berperan sebagai unsur penunjang dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dinas ini dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah koordinasi dan bertanggung jawab kepada Wali Kota Tarakan melalui Sekretaris Daerah.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Perikanan Kota Tarakan berpedoman pada Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 75 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kota Tarakan. Peraturan ini menjadi dasar dalam pelaksanaan berbagai program strategis guna mendukung pembangunan sektor perikanan di Kota Tarakan secara berkelanjutan.

a. Tugas

Tugas Dinas Perikanan Kota Tarakan adalah membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kelautan sub urusan perikanan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas perbantuan yang diberikan kepada Daerah.

b. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugasnya Dinas Perikanan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Perumusan kebijakan teknis daerah di bidang perikanan;
- 2) Merencanakan dan menyelenggarakan urusan perikanan dan pelayanan umum;
- 3) Pelaksanaan pengkajian penerapan teknologi anjuran di tingkat usaha pembudidaya perikanan;
- 4) Pembinaan teknis operasional berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;

- 5) Bimbingan teknis bidang perikanan;
- 6) Pembinaan dan penyuluhan bidang perikanan;
- 7) Pelaksanaan dan pendampingan program dan kegiatan teknis berdasarkan tugas pembantuan teknis yang terkait;
- 8) Pelaksanaan dan penataan operasional Tempat Pelelangan Ikan (TPI);
- 9) Pelaksanaan dan penataan pengujian, penerbitan dan pembinaan serta pengawasan perizinan usaha perikanan
- 10) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

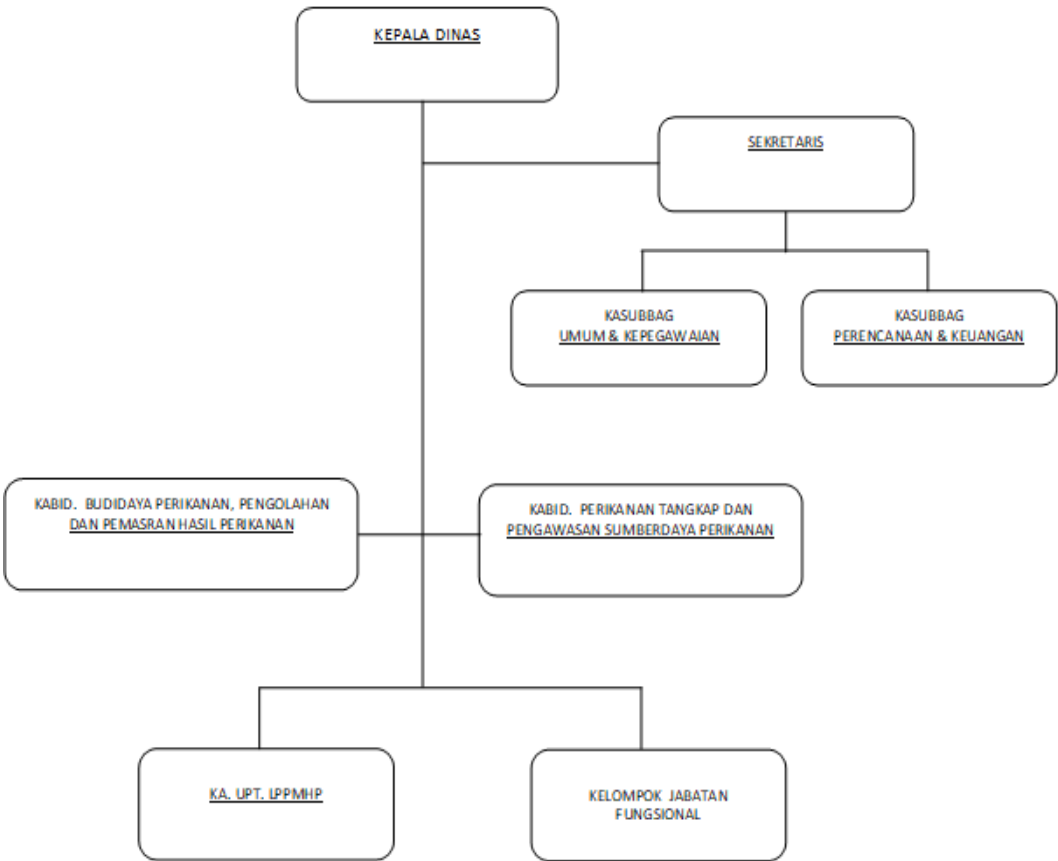
c. Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Struktur Organisasi Dinas Perikanan Kota Tarakan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kota Tarakan. Sementara itu, tugas dan fungsi Dinas Perikanan Kota Tarakan mengacu pada Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 75 Tahun 2020 yang mengatur tentang Tugas Pokok, Fungsi, serta Tata Kerja Organisasi Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Perikanan.

Struktur organisasi ini dirancang untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi dinas dalam mengembangkan serta mengelola sektor perikanan di Kota Tarakan. Adapun susunan organisasi Dinas Perikanan Kota Tarakan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 9 Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- 1). Unsur Pimpinan : Kepala Dinas
- 2). Unsur Pembantu Pimpinan :
 - 1. Sekretariat
 - 2. Bidang Perikanan Budidaya Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan
 - 3. Bidang Perikanan Tangkap dan Pengawasan Sumberdaya Perikanan
 - 4. Unit Pelaksana Teknis
 - 5. Kelompok Jabatan Fungsional
- a) Sekretariat :
 - a.1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - a.2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
- b) Bidang Perikanan Budidaya dan Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan :
 - b.1. Seksi Pemberdayaan Usaha Budidaya
 - b.2. Seksi Produksi dan Kesehatan Ikan
 - b.3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
- c) Bidang Perikanan Tangkap dan Pengawasan Sumberdaya Perikanan :
 - c.1. Seksi Sarana dan Prasarana Pelayanan Perikanan Tangkap
 - c.2. Seksi Pembinaan dan Pemberdayaan Nelayan
 - c.3. Seksi Pengawasan Sumberdaya Perikanan

Bagan Struktur Organisasi Dinas Perikanan Kota Tarakan



Gambar 2. 1 Bagan Struktur Organisasi Dinas Perikanan Kota Tarakan

d. Kedudukan Tugas Dan Fungsi Dinas

- 1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintah di bidang perikanan yang menjadi kewenangan daerah
- 2) Dinas sebagaimana maksud di pimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah tanggung jawab kepada walikota melalui seketaris daerah.
- 3) Dinas sebagaimana dimaksud mempunyai tugas membantu Walikota Tarakan melaksanakan urusan pemerintah di bidang perikanan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang di berikan kepada daerah.

Dinas Perikanan Kota Tarakan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- 1) Merumuskan kebijakan teknis daerah di bidang perikanan .
- 2) Merencanakan dan menyelenggarakan urusan perikanan dan pelayanan umum

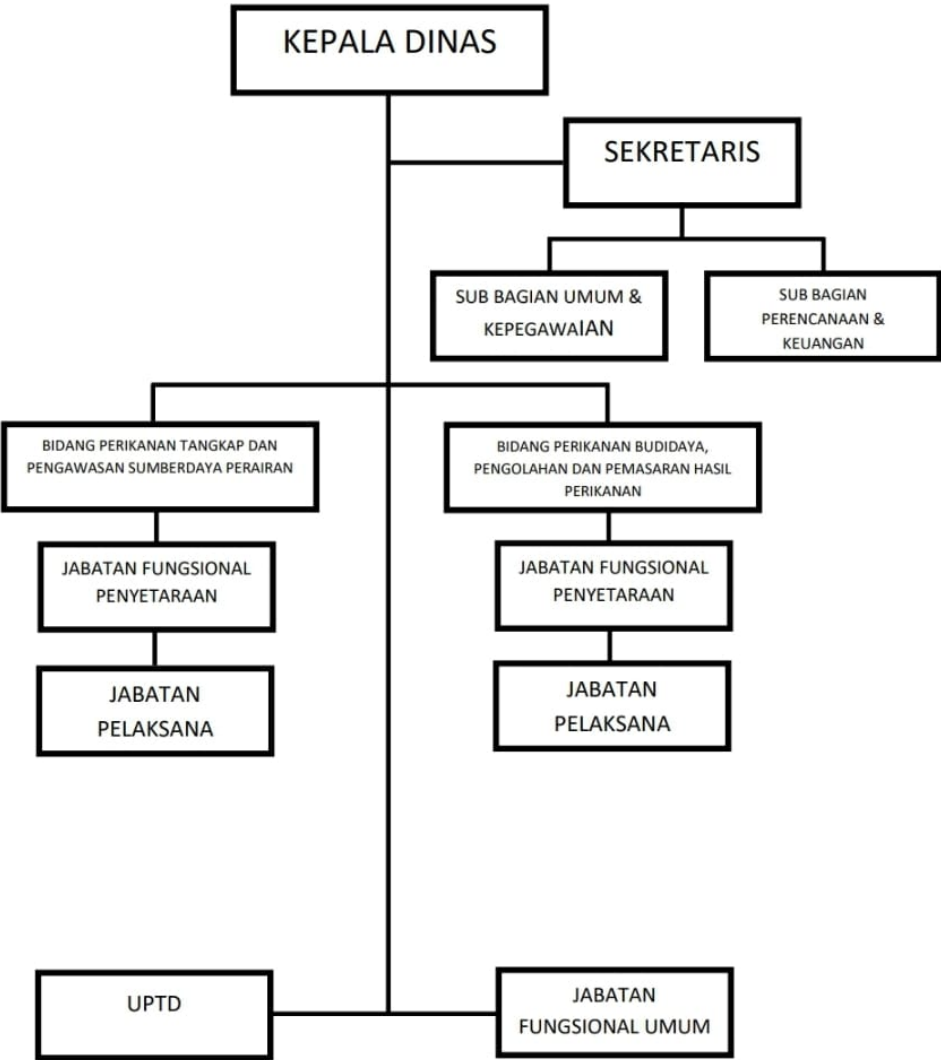
- 3) Pelaksanaan pengkajian penerapan teknologi anjuran di tingkat usaha pembudidayaan perikanan
- 4) Pembinaan teknis oprasional berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh kepala daerah
- 5) Pembimbingan teknis bidang perikanan
- 6) Pembinaan dan penyuluhan bidang perikanan
- 7) Pelaksanaan dan pendampingan program dan kegiatan teknis berdasarkan tugas pembantuan teknis terkait
- 8) Pelaksanaan dan penataan pengujian ,penerbitan dan pembinaan serta pengawasan perizinan usaha ikan
- 9) Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh wali kota terkait dengan tugas dan fungsi
- 10) Pelaksananan fungsi lain yang di berikan oleh wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

e. Perubahan Struktur Organisasi Dinas Perikanan Kota Tarakan

Pada awal tahun 2023, struktur organisasi Dinas Perikanan Kota Tarakan mengalami penyesuaian seiring dengan kebijakan penyederhanaan birokrasi. Penyesuaian ini mengacu pada:

- 1) **P**eraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN-RB) Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah.
- 2) PermenPAN-RB Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional.
- 3) Surat Keputusan Wali Kota Tarakan Nomor 100.3.3.3/HK-VI/356/2024 tertanggal 26 Juni 2024 tentang Peta Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota Tarakan.

Dengan diberlakukannya regulasi tersebut, jabatan struktural eselon IV dihapus, kecuali untuk jabatan tertentu di sekretariat serta unit pelaksana teknis daerah (UPTD). Sementara itu, jabatan kepala seksi dialihkan menjadi pejabat fungsional penyetaraan. Adapun struktur organisasi yang berlaku pada Dinas Perikanan Kota Tarakan saat ini dapat dilihat pada gambar 2.2



Gambar 2. 2 Struktur Organisasi Penyesuaian Dinas Perikanan Kota Tarakan

2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

a. Sumber Daya Manusia

Dinas Perikanan Kota Tarakan didukung oleh sumber daya manusia yang terdiri dari ASN dan Non-ASN dengan berbagai latar belakang pendidikan dan jabatan. Per 31 Desember 2024, jumlah pegawai yang bertugas di Dinas Perikanan Kota Tarakan sebanyak 49 orang, yang terdiri dari 30 ASN, 19 Non-ASN daerah, dan 2 ASN pusat. Dari segi komposisi jabatan, terdapat pegawai pada jabatan struktural, fungsional, serta tenaga non-struktural yang mendukung operasional dinas.

Meskipun jumlah SDM yang tersedia cukup untuk menjalankan tugas-tugas dinas, masih terdapat tantangan dalam optimalisasi kinerja dan peningkatan kompetensi pegawai. Beberapa pegawai dari kalangan ASN dan Non-ASN daerah, masih memerlukan peningkatan motivasi dan keterampilan untuk dapat berkontribusi lebih optimal dalam penyelenggaraan layanan publik. Oleh karena itu, diperlukan strategi pengembangan SDM, termasuk pelatihan teknis, pembinaan berkala, serta mekanisme evaluasi yang lebih sistematis guna meningkatkan kualitas dan produktivitas kerja

Dalam upaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja pegawai, Dinas Perikanan Kota Tarakan juga berencana untuk memperkuat mekanisme monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala. Evaluasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi pegawai yang memerlukan pendampingan lebih lanjut serta memberikan penghargaan bagi pegawai yang berprestasi. Selain itu, pendekatan pembinaan yang lebih terarah, seperti mentoring dan pelatihan berbasis kompetensi, akan diterapkan untuk meningkatkan profesionalisme dan motivasi kerja, terutama bagi tenaga Non-ASN daerah. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan seluruh pegawai dapat berkontribusi secara optimal dalam mendukung pencapaian Kinerja Dinas Perikanan Kota Tarakan

Tabel 2. 1 Jumlah Pegawai Menurut Kelompok Umur

No	Unit Kerja	Usia (Tahun)								Jumlah (Orang)
		20 - 25	26 - 30	31 - 35	36 - 40	41 - 45	46 - 50	51 - 55	56 - 60	
1.	Kepala Dinas								1	1
2.	Sekretariat		3		2	2	5	1		13
3.	Bidang Perikanan Tangkap dan Pengawasan Sumberdaya Perairan		1		1	2	4			8
4	Bidang Perikanan Budidaya, Penolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan		2		1	3	2	2		10
5.	UPTD LPMHP				1	3	2	1		7
6.	Jabatan Fungsional (Umum & Penyetaraan)			1	2		3	1		7
7.	Penyuluh Perikanan		1	1	1					3
TOTAL			7	2	8	10	16	5	1	49

Berdasarkan Tabel 2.1. struktur pegawai Dinas Perikanan Kota Tarakan saat ini didominasi oleh kelompok usia 41-45 tahun sebesar **32,65%**, diikuti oleh pegawai usia 36-40 tahun (**20,41%**) dan 31-35 tahun (**16,33%**). Kelompok usia muda, yaitu di bawah 30 tahun, hanya mencapai **18,37%**, menunjukkan bahwa regenerasi pegawai masih terbatas. Sementara itu, pegawai berusia 51 tahun ke atas sangat sedikit (**2,04%**) dan tidak ada pegawai dalam kelompok usia 56-60 tahun, yang mengindikasikan sebagian besar pegawai pensiun sebelum mencapai usia tersebut.

Dengan komposisi ini, diperlukan strategi perencanaan sumber daya manusia yang lebih baik, terutama dalam rekrutmen pegawai muda dan transfer pengetahuan dari pegawai senior. Upaya ini penting agar keberlanjutan pelayanan dan pengelolaan sektor perikanan tetap berjalan optimal seiring dengan potensi pensiunnya pegawai dalam beberapa tahun mendatang.

Tabel 2. 2 Jumlah Pegawai Menurut Golongan

No	Unit Kerja	Golongan				Jumlah (Orang)
		I	II	III	IV	
1.	Kepala Dinas				1	1
2.	Sekretariat		1	6	1	8
3.	Bidang Perikanan Tangkap dan Pengawasan Sumberdaya Perairan			3		3
4	Bidang Perikanan Budidaya, Penolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan			3	1	4
5.	UPTD LPMHP		1	3		4
6.	Jabatan Fungsional (Umum & Penyetaraan)		1	5	1	7
7	Penyuluh Perikanan		1	1		2
TOTAL			4	21	4	29

Struktur pegawai Dinas Perikanan Kota Tarakan pada Tabel 2.2 didominasi oleh Golongan III sebanyak 21 orang (72,41%), diikuti oleh Golongan II dengan 4 orang (13,79%), serta Golongan IV juga sebanyak 4 orang (13,79%), sementara Golongan I tidak memiliki pegawai (0%).

Mayoritas pegawai berada pada Golongan III, yang mencerminkan dominasi tenaga teknis dan fungsional dalam struktur organisasi. Sementara itu, jumlah pegawai Golongan II yang relatif kecil (13,79%) dapat menjadi perhatian dalam perencanaan SDM ke depan, terutama dalam regenerasi tenaga kerja. Tidak adanya pegawai dalam Golongan I menunjukkan bahwa rekrutmen pegawai baru langsung diarahkan ke jenjang yang lebih tinggi.

Tabel 2. 3 Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

No	Unit Kerja	Tingkat Pendidikan						Jumlah (Orang)
		SD	SLTP	SMA	D3	D4/S1	S2	
1.	Kepala Dinas					1		1
2.	Sekretariat			1	1	5	1	8
3.	Bidang Perikanan Tangkap dan Pengawasan Sumberdaya Perairan			1	1	2		4
4	Bidang Perikanan Budidaya, Penolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan				1	2		3
5.	UPTD LPMHP			1	1	2		4

6.	Jabatan Fungsional (Umum & Penyetaraan)				1	4	2	7
7.	Penyuluh Perikanan				1	1		2
8.	Non ASN APD		1	11		7		19
9.	Non ASN APBN					1		1
TOTAL			1	14	6	25	3	49

Berdasarkan Tabel 2.3, tingkat pendidikan, mayoritas pegawai Dinas Perikanan Kota Tarakan memiliki latar belakang D4/S1 sebanyak 25 orang (51,02%), diikuti oleh SMA sebanyak 14 orang (28,57%), dan D3 sebanyak 6 orang (12,24%). Pegawai dengan pendidikan S2 berjumlah 3 orang (6,12%), sementara SLTP hanya 1 orang (2,04%). Tidak ada pegawai dengan tingkat pendidikan SD (0%).

Dari data ini terlihat bahwa sebagian besar pegawai memiliki pendidikan tinggi (D4/S1), sedangkan jumlah pegawai dengan pendidikan SLTP sangat sedikit. Pegawai dengan tingkat pendidikan S2 merupakan jumlah yang paling sedikit setelah SLTP

Tabel 2. 4 Jumlah Pegawai Menurut Jabatan

No	Jabatan	Jumlah
1.	Eselon II b	1
2.	Eselon III a	1
3.	Eselon III b	1
4.	Eselon IV a	1
5.	Eselon IV b	1
6.	Fungsional Penyetaraan	5
7.	Fungsional Tertentu	2
8.	Fungsional Penyuluh Perikanan	2
9.	Non Eselon	15
TOTAL		29

Berdasarkan jabatan Tabel 2.4, pegawai Non Eselon mendominasi dengan 15 orang (55,56%), diikuti oleh Fungsional Penyetaraan sebanyak 5 orang (18,52%). Pegawai dengan jabatan Fungsional Tertentu dan Fungsional Penyuluh Perikanan masing-masing berjumlah 2 orang (7,41%).

Sementara itu, pegawai dalam jabatan struktural Eselon II b, Eselon III a, dan Eselon IV b masing-masing hanya 1 orang (3,70%). Jabatan yang saat ini kosong meliputi Eselon III b (Kepala Bidang Perikanan Tangkap dan Pengawasan Sumberdaya Perairan), Eselon IV a (Kasubbag Umum & Kepegawaian), serta 1 posisi Fungsional Penyetaraan (Analisis Kesehatan Ikan & Lingkungan Ahli Muda)

Sementara itu, Berdasarkan jenis kelamin Tabel 2.5, pegawai laki-laki mendominasi dengan 32 orang (65,31%), sedangkan pegawai perempuan berjumlah 17 orang (34,69%). Dari data ini terlihat bahwa jumlah pegawai laki-laki lebih banyak dibandingkan perempuan di Dinas Perikanan Kota Tarakan. Selanjutnya Berdasarkan jenis kelamin dalam jabatan Tabel 2.6, pegawai laki-laki berjumlah 16 orang (57,14%), sedangkan pegawai perempuan berjumlah 12 orang (42,86%).

Dari data ini terlihat bahwa pegawai laki-laki masih mendominasi dalam berbagai jabatan di Dinas Perikanan Kota Tarakan, meskipun selisihnya tidak terlalu jauh dibandingkan pegawai perempuan

Tabel 2. 5 Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin

No	Unit Kerja	Jenis Kelamin		Jumlah
		P	L	
1.	Kepala Dinas		1	1
2.	Sekretariat	5	3	8
3.	Bidang Perikanan Tangkap dan Pengawasan Sumberdaya Perairan	1	3	4
4	Bidang Perikanan Budidaya, Penolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	1	2	3
5.	UPTD LPMHP	3	1	4
6.	Jabatan Fungsional (Umum & Penyetaraan)	2	5	7
7.	Penyuluh Perikanan	1	1	2
8.	Non ASN APBD	3	16	19
9.	Non ASN APBN (Penyuluh Perikanan Bantu)	1		1
TOTAL		17	32	49

Tabel 2. 6 Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin & Jabatan

No	Unit Kerja	Jenis Kelamin		Jumlah
		P	L	
1.	Eselon II b		1	1
2.	Eselon III a		1	1
3.	Eselon III b		1	1
4	Eselon IV a		1	1
5.	Eselon IV b	1		1
6.	Fungsional Penyetaraan	1	4	5
7.	Fungsional Tertentu	1	1	2
8.	Fungsional Penyuluh Perikanan	1	1	2
9.	Non Eselon	8	6	14
TOTAL		12	16	28

b. Aset/Modal

Peralatan dan perlengkapan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perikanan Kota Tarakan dapat dilihat pada Tabel 2.7 sebagai berikut :

Tabel 2. 7 Jumlah Aset/Modal Menurut Jenis Pada Dinas Perikanan Tahun 2024

No	Jenis Aset/Modal	Jumlah Barang	Kondisi		Keterangan
			Baik	Rusak Berat	
1	Alat-Alat Angkutan				
a.	Kendaraan Roda 4	7	√		
b.	Kendaraan Roda 2	19	√		
2	Alat-alat Laboratorium	370	√		
3	Alat-alat Kantor dan Alat-alat Rumah Tangga				
A	Alat Kantor	116	√		
B	Meubelair	268	√		
C	Personal Komputer	15	√		
D	Laptop/Netbook/Notebook	16	√		

2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Evaluasi terhadap kinerja pelayanan Dinas Perikanan Kota Tarakan dilakukan berdasarkan indikator yang sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah, serta mengacu pada target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, termasuk Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK), Indikator Kinerja Kunci (IKK), serta target lainnya yang relevan. Penilaian capaian ini mencerminkan efektivitas penyelenggaraan pelayanan publik di bidang perikanan dalam lima tahun terakhir, dari tahun 2020 hingga 2024.

Capaian kinerja pelayanan dievaluasi melalui perbandingan antara target Renstra tahunan dan realisasi faktual yang berhasil dicapai setiap tahun. Analisis rasio capaian digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas program, sekaligus mengidentifikasi tren capaian dan potensi perbaikan ke depan. Beberapa indikator utama yang dianalisis meliputi produksi hasil perikanan tangkap, produksi perikanan budidaya, kepatuhan pelaku usaha perikanan, serta volume hasil pemasaran produk perikanan.

Secara umum, data capaian menunjukkan bahwa Dinas Perikanan Kota Tarakan telah mampu melampaui sebagian besar target yang ditetapkan, khususnya dalam indikator perikanan tangkap dan pengolahan-pemasaran hasil perikanan. Hal ini menunjukkan efektivitas pelaksanaan program, meskipun masih terdapat beberapa fluktuasi pada capaian subsektor budidaya yang memerlukan penguatan kelembagaan dan sarana produksi.

Informasi selengkapnya mengenai kinerja pelayanan perangkat daerah selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada **Tabel 2.8**.

Berdasarkan Tabel 2.8, dapat disimpulkan bahwa kinerja pelayanan Dinas Perikanan Kota Tarakan dalam periode 2020–2024 secara umum menunjukkan tren capaian yang cukup baik, meskipun masih terdapat variasi antar indikator.

Untuk **indikator Produksi Hasil Perikanan Tangkap**, capaian realisasi selalu melebihi target pertumbuhan 4% per tahun. Tahun

2021 mencatat lonjakan signifikan sebesar 150,3% dari target, dan capaian tahun 2024 menunjukkan rasio realisasi sebesar 133%. Hal ini mencerminkan peningkatan produktivitas nelayan di lapangan, yang antara lain didukung oleh bantuan sarana tangkap, pembinaan kelompok nelayan kecil, serta pendataan hasil produksi yang lebih akurat dan terintegrasi.

Sementara itu, pada **indikator Produksi Perikanan Budidaya**, kinerja menunjukkan fluktuasi. Tahun 2021 masih mencatat pencapaian di atas target sebesar 108,7%, namun mulai menurun pada 2022 hingga 2024, dengan rasio capaian di tahun terakhir sebesar 94,6%. Penurunan ini menunjukkan bahwa pengelolaan subsektor budidaya menghadapi tantangan, seperti keterbatasan akses benih dan pakan, fluktuasi harga pasar (terutama udang dan rumput laut), serta dampak kualitas lingkungan yang belum optimal. Kondisi ini menjadi perhatian dalam strategi Renstra ke depan, terutama dalam hal penguatan kelembagaan dan peningkatan dukungan sarana produksi budidaya.

Pada **indikator Kepatuhan Pelaku Usaha**, capaian menunjukkan hasil yang sangat positif dan konsisten, dengan rasio pencapaian 100% selama empat tahun berturut-turut dan meningkat menjadi 208% di tahun 2024. Hal ini menunjukkan keberhasilan dalam peningkatan pengawasan dan pembinaan pelaku usaha kecil di sektor perikanan, termasuk penerapan pelaporan usaha dan fasilitasi legalitas kegiatan mikro perikanan sesuai kewenangan daerah.

Terakhir, **Produksi Pemasaran Hasil Perikanan** mengalami peningkatan yang cukup progresif. Realisasi di tahun 2024 mencapai 35.866 ton, jauh di atas target sebesar 17.233 ton, dengan rasio capaian sebesar 177%. Kinerja ini mengindikasikan bahwa penguatan jaringan pemasaran, pendampingan UMKM pengolah hasil perikanan, serta fasilitasi sarana pasca panen (seperti cold storage dan promosi produk) sudah mulai menunjukkan hasil nyata. Lonjakan ini juga dipengaruhi oleh peningkatan kapasitas pelaku usaha pengolahan dan ketersediaan pasar lokal yang lebih stabil.

Secara keseluruhan, Dinas Perikanan Kota Tarakan telah menunjukkan capaian kinerja yang baik dan mampu memberikan

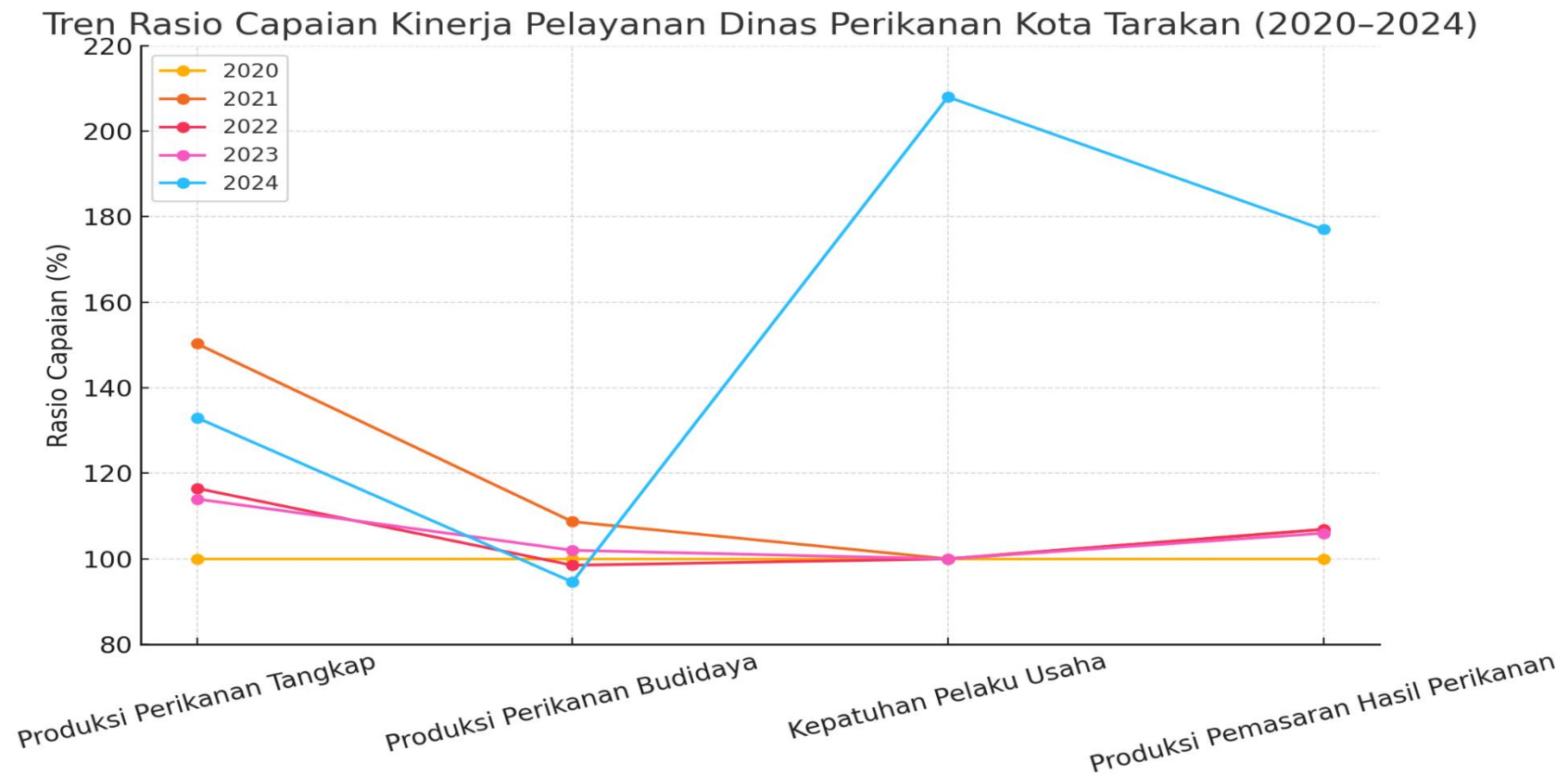
kontribusi nyata terhadap pembangunan daerah melalui sektor perikanan. Namun demikian, tantangan seperti kestabilan harga komoditas, akses subsidi dan teknologi, serta kapasitas kelembagaan pelaku utama masih perlu diperkuat pada periode perencanaan lima tahun ke depan (2025–2029).

Gambar 2.3. adalah visualisasi tren rasio capaian kinerja pelayanan Dinas Perikanan Kota Tarakan selama tahun 2020 hingga 2024 untuk empat indikator utama. Grafik ini memperlihatkan:

- Produksi perikanan tangkap menunjukkan tren fluktuatif namun positif, terutama capaian tinggi di tahun 2021 dan konsisten membaik hingga 2024.
- Produksi perikanan budidaya mengalami puncak capaian pada 2021 dan menurun pada 2024, meski tetap berada di atas baseline.
- Kepatuhan pelaku usaha konsisten di angka 100% hingga 2023 dan melonjak signifikan pada 2024.
- Produksi pemasaran hasil perikanan menunjukkan tren naik stabil dan tajam pada 2024.

Tabel 2. 8 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kota Tarakan

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Dinas Perikanan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian pada tahun ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Produksi Hasil Perikanan Tangkap		4%		13.441	13.978	14.537	15.118	15.722	13.441	21.024	16.939	17.252	20.917	100%	150,3%	116,5%	114,%	133%
2	Produksi Perikanan Budidaya		5%		185.732	195.018	204.768	215.006	225.756	185.732	211.861	201.727	22.1125	21.345	100%	108,7%	98,51%	102%	94,6%
3	Kepatuhan Pelaku Usaha		5%		5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	8,86%	100%	100%	100%	100%	208%
4	Produksi Pemasaran Hasil Perikanan		2%		16.081	16.241	16.484	16.813	17.233	16.081	17.358	17.621	17.826	35.866	100%	106,9%	106,9%	106%	177%



Gambar 2. 3 Tren Rasio Capaian Pelayanan Dinas Perikanan Kota Tarakan (2020-2024)

Secara paralel, kinerja pelayanan juga tercermin dari tingkat realisasi anggaran yang digunakan untuk mendukung program-program strategis (Tabel 2.9). Selama kurun waktu 2021 hingga 2024, belanja perangkat daerah cenderung mengalami peningkatan baik dari sisi jumlah maupun efektivitas penggunaannya. Realisasi belanja pada tahun 2021 tercatat sebesar Rp5,7 miliar, meningkat menjadi Rp14,1 miliar pada tahun 2024. Komposisi belanja paling dominan berasal dari belanja operasi, khususnya pada komponen belanja pegawai dan belanja hibah.

Belanja pegawai secara konsisten menjadi pengeluaran terbesar setiap tahun, menunjukkan keberlangsungan layanan publik yang bergantung pada kapasitas SDM internal. Namun demikian, peningkatan yang paling signifikan terjadi pada belanja hibah dan belanja barang dan jasa, yang mengindikasikan semakin besarnya intervensi langsung pemerintah daerah dalam mendorong produktivitas masyarakat pelaku utama sektor perikanan. Belanja barang dan jasa yang meningkat tajam dari tahun 2022 ke 2024 sejalan dengan meningkatnya kebutuhan pelatihan, fasilitasi pemasaran, serta penyediaan sarana produksi dan pengolahan. Sementara itu, belanja modal seperti pengadaan peralatan dan mesin juga turut memberikan kontribusi dalam mendukung peningkatan efisiensi usaha perikanan skala kecil.

Secara keseluruhan, capaian indikator kinerja dan realisasi anggaran tersebut menunjukkan adanya hubungan yang sinergis antara pelaksanaan kegiatan dengan hasil yang diperoleh. Dinas Perikanan Kota Tarakan telah menunjukkan kemampuan dalam mengelola program prioritas secara terukur dan berorientasi pada hasil, serta menjawab kebutuhan masyarakat nelayan, pembudidaya, pengolah, dan pemasar hasil perikanan secara nyata dan berkelanjutan.

Tabel 2. 9 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kota Tarakan

Uraian	Anggaran Pada Tahun				Realisai Anggaran Tahun			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Pendapatan Asli Daerah	Rp.60.000.000	Rp.200.000.000	Rp.13.000.000	Rp. 10.000.000	Rp. 85.630.000,00	Rp. 89.285.000,00	Rp.9.245.000	Rp. 17.085.000
BELANJA	Rp.6.141.719.986	Rp.9.483.966.510	Rp.7.601.717.224	Rp.14.849.142.703	Rp.5.746.046.036	Rp. 8.949.282.929	Rp.5.788.076.105	Rp. 14.135.244.059
BELANJA OPERASI	Rp.5.516.131.555	Rp.9.240.702.390	Rp.7.425.013.377	Rp.14.369.022.149	Rp.5.222.473.526	Rp. 8.722.685.309	Rp.5.697.076.105	Rp.13.671.915.919
Belanja Pegawai	Rp.3.960.140.444	Rp.4.084.444.280	Rp.4.156.877.166	Rp.4.446.555.375	Rp.3.830.936.131	Rp.3.846.865.862	Rp.3.592.238.169	Rp.4.165.552.731
Belanja Barang dan Jasa	Rp.675.865.111	Rp.654.948.310	Rp.1.513.337.611	Rp.2.635.983.274	Rp.518.321.895	Rp.581.021.510	Rp.1050.197.936	Rp.2.316.227.741
Belanja Hibah	Rp.880.126.000	Rp.4.501.309.800	Rp.1.754.798.600	Rp.7.286.483.500	Rp.873.215.500	Rp.4.294.797.937	Rp.1.054.640.000	Rp.7.190.135.447
BELANJA MODAL	Rp.625.588.431	Rp.243.264.120	Rp.176.703.847	Rp.480.120.554	Rp.523.572.510	Rp.226.597.620	Rp.91.000000	\Rp.463.328.140
Belanja Peralatan dan Mesin	Rp.105.709.650	Rp. 91.033.460	Rp.176.703.847	Rp.430.120.554	Rp.103.707.510	Rp.86.071.620	Rp.91.000.000	Rp.415.528.140
Belanja Bangunan dan Gedung	Rp.302.665.000	Rp.152.230.660			Rp.202.665.000	Rp.140.526.000		
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp.217.213.781				Rp.217.200.00			

Sumber: Laporan Keuangan Dinas Perikanan

2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan Dinas Perikanan Kota Tarakan merupakan pihak-pihak utama yang secara langsung menerima manfaat dari pelaksanaan tugas dan fungsi dinas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan. Penentuan kelompok sasaran layanan ini penting sebagai dasar dalam merancang program, kegiatan, serta subkegiatan yang tepat sasaran, efisien, dan berdampak nyata.

Kelompok sasaran layanan Dinas Perikanan Kota Tarakan meliputi:

- Nelayan tangkap tradisional, baik individu maupun dalam bentuk kelompok usaha bersama (KUB), yang membutuhkan dukungan dalam bentuk bantuan sarana tangkap, pelatihan, akses permodalan, dan penguatan kelembagaan.
- Pembudidaya ikan skala kecil, yang membutuhkan akses terhadap benih, pakan, teknologi budidaya, pengendalian penyakit ikan, serta pelatihan peningkatan kapasitas produksi dan mutu hasil.
- Pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan skala kecil, termasuk kelompok pengolah dan pemasar (Poklahsar) berbasis hasil laut, yang menjadi target fasilitasi dalam hal standardisasi mutu, pemasaran, sertifikasi, dan pengembangan jejaring pasar.
- Masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, yang membutuhkan intervensi program pemberdayaan berbasis sumber daya lokal untuk menjaga ketahanan ekonomi dan ekosistem pesisir.
- Lembaga pendidikan dan pelatihan kejuruan bidang kelautan dan perikanan, sebagai mitra strategis dalam penyediaan tenaga kerja yang kompeten dan mendukung regenerasi SDM perikanan.

- Organisasi profesi, kelompok masyarakat, dan LSM, yang aktif dalam bidang konservasi, pengawasan, dan pemberdayaan masyarakat pesisir, sebagai mitra kolaboratif dalam penguatan pengelolaan sumber daya perikanan yang partisipatif.
- Pemangku kepentingan internal Pemerintah Daerah, seperti Bappeda, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Lingkungan Hidup, dan lainnya, yang menjadi mitra dalam perencanaan terpadu lintas sektor pembangunan daerah.

Identifikasi kelompok sasaran ini menjadi landasan penting dalam proses perumusan arah kebijakan, strategi, serta penyusunan indikator kinerja program dan kegiatan, agar pelayanan publik yang diberikan oleh Dinas Perikanan dapat menjawab kebutuhan nyata dan menghasilkan dampak signifikan bagi pembangunan daerah, khususnya di wilayah pesisir dan masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada sektor perikanan

2.1.5. Mitra Kerja Perangkat Daerah dalam Memberikan Layanan

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan jangkauan pelayanan publik, Dinas Perikanan Kota Tarakan membangun kerja sama strategis dengan berbagai pihak, baik dari unsur pemerintah, swasta, akademisi, komunitas, maupun media. Kemitraan ini diarahkan untuk mendukung pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan, peningkatan produksi, pengolahan, distribusi, hingga promosi hasil perikanan.

Pendekatan kolaboratif ini memungkinkan sinergi program dan optimalisasi sumber daya, sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat lebih cepat, tepat sasaran, dan berdaya guna.

Mitra perangkat daerah dan instansi/lembaga terkait yang berperan dalam mendukung kinerja pelayanan Dinas Perikanan Kota Tarakan dapat dilihat pada tabel 2.10.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Dalam rangka menjamin ketepatan perencanaan dan efektivitas penyusunan program serta kegiatan, diperlukan identifikasi secara cermat terhadap permasalahan dan isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Perikanan Kota Tarakan. Permasalahan dan isu strategis ini dianalisis berdasarkan capaian kinerja pelayanan, tantangan aktual, serta perubahan lingkungan strategis, baik di tingkat lokal, regional, maupun nasional.

Tabel 2.10 Mitra Perangkat Daerah dan Dukungan Kinerja

No	Mitra Perangkat Daerah	Jenis Layanan	Dukungan Kinerja
1	Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)	Bantuan sarana dan prasarana perikanan	Meningkatkan ketersediaan sarana tangkap, budidaya, dan pengolahan
2	Balai Karantina Ikan Tarakan	Data ekspor/impor hasil perikanan dan pengawasan kesehatan ikan	Tersedianya data dan jaminan mutu hasil perikanan
3	Dinas Perhubungan Kota Tarakan	Pengaturan lalu lintas kapal dan pelabuhan perikanan	Kelancaran distribusi hasil tangkap dan budidaya
4	Kepolisian & TNI AL	Patroli pengawasan sumber daya kelautan	Menjaga keamanan dan ketertiban kegiatan perikanan
5	Dinas Lingkungan Hidup	Pengawasan pencemaran laut dan pesisir	Perlindungan ekosistem dan kualitas lingkungan perairan
6	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	Hilirisasi, promosi, dan akses pasar	Peningkatan daya saing produk perikanan
7	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan infrastruktur pendukung perikanan	Dermaga, jalan akses, dan fasilitas pendukung lainnya
8	Universitas Borneo Tarakan	Riset dan pendampingan teknologi perikanan	Inovasi dan peningkatan kapasitas SDM perikanan
9	Bappeda Kota Tarakan	Sinkronisasi program dan perencanaan	Integrasi program perikanan dalam dokumen perencanaan daerah
10	Media lokal (cetak dan elektronik)	Publikasi kegiatan dan informasi perikanan	Meningkatkan transparansi dan literasi masyarakat

Permasalahan diartikan sebagai kesenjangan antara kondisi eksisting (realita/capaian saat ini) dengan kondisi ideal yang seharusnya dicapai sesuai standar pelayanan minimal, norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK), serta target pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam RPJMD. Sementara itu, isu strategis merujuk pada hal-hal pokok dan bersifat kritikal yang berpotensi memberi

dampak signifikan terhadap keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam jangka pendek maupun panjang.

2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan pelayanan Dinas Perikanan Kota Tarakan merupakan kesenjangan antara capaian aktual dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia. Permasalahan ini muncul dari hasil evaluasi capaian kinerja 2024 serta kajian potensi dan tantangan sektoral yang dihadapi oleh nelayan, pembudidaya, dan pelaku usaha perikanan.

Produksi sektor perikanan di Kota Tarakan menunjukkan capaian yang fluktuatif dan belum sepenuhnya konsisten dengan target Renstra. Meskipun terdapat peningkatan pada produksi perikanan tangkap—dari 13.441 ton di 2020 menjadi 20.917 ton di 2024 (133,04% dari target)—namun pada perikanan budidaya justru terjadi penurunan capaian, dari 108,68% (2021) menjadi hanya 94,55% (2024). Capaian produksi pengolahan dan pemasaran perikanan bahkan mengalami lonjakan yang tidak proporsional di tahun 2024 (208,12%), yang menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara produksi hulu dan hilir, serta kemungkinan kurang akuratnya target awal. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun target secara kuantitatif tercapai, secara substansi dan kesinambungan masih menghadapi berbagai persoalan struktural di lapangan.

Permasalahan utama yang mendasari rendahnya stabilitas produksi meliputi terbatasnya infrastruktur perikanan, akses permodalan yang belum memadai, serta distribusi BBM bersubsidi yang tidak merata. Selain itu, minimnya pelatihan dan pendampingan teknis kepada pelaku usaha, baik dalam budidaya maupun pengolahan, berdampak pada rendahnya produktivitas dan daya saing. Fluktuasi harga yang tinggi, serta tingginya biaya produksi, memperburuk kepastian usaha. Di sisi kelembagaan, kapasitas kelompok nelayan dan pembudidaya masih terbatas, sehingga tidak mampu menjalankan fungsi ekonomi dan tata kelola secara mandiri. Pengawasan terhadap kegiatan

budidaya dan pengolahan, termasuk UPI skala kecil, juga belum optimal dalam aspek mutu, legalitas, dan keamanan pangan.

Dari aspek tata kelola internal perangkat daerah, nilai akuntabilitas kinerja Dinas Perikanan Kota Tarakan dalam 4 tahun terakhir mengalami tren yang kurang stabil. Setelah bertahan pada predikat “B” di 2021 dan 2022, capaian turun menjadi “CC” di 2023 sebelum kembali ke “B” di 2024. Penurunan ini menunjukkan adanya permasalahan sistemik dalam manajemen kinerja, khususnya terkait efektivitas sistem pengawasan, monitoring, dan evaluasi internal, serta rendahnya kompetensi dan motivasi SDM berbasis kinerja. Oleh karena itu, selain intervensi sektoral perikanan, perbaikan tata kelola internal perangkat daerah juga menjadi kunci dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik secara menyeluruh.

2.2.2. Isu Strategis

Isu strategis merupakan kondisi, tantangan, atau permasalahan utama yang diperkirakan akan memberikan pengaruh signifikan terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam jangka menengah. Identifikasi isu strategis sangat penting untuk memastikan bahwa arah kebijakan dan prioritas pembangunan perangkat daerah selaras dengan dinamika eksternal maupun kebutuhan lokal, serta mampu menjawab tantangan yang berkembang di masa mendatang.

Penentuan isu strategis Dinas Perikanan Kota Tarakan dilakukan melalui analisis terhadap potensi dan permasalahan sektoral, hasil evaluasi capaian kinerja lima tahun terakhir, serta keterkaitan dengan dokumen perencanaan di tingkat nasional, provinsi, dan kota. Secara khusus, penajaman isu strategis juga merujuk pada Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan, RPJMD Provinsi Kalimantan Utara, serta Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang menjadi bagian integral dalam perencanaan pembangunan daerah. Isu-isu strategis yang diidentifikasi kemudian dikelompokkan berdasarkan lingkupnya, yaitu isu global, nasional, regional, dan lokal.

Tabel 2.11 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dinas Perikanan Kota Tarakan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Masih rendahnya kontribusi Sektor Perikanan	Rendahnya Produksi sektor Perikanan	Terbatasnya infrastruktur perikanan
		Akses permodalan dan investasi masih terbatas
		Minimnya Pelatihan Keterampilan bagi pelaku usaha Perikanan
		Distribusi dan ketersediaan BBM bersubsidi tidak merata
		Fluktuasi harga hasil perikanan
		Belum optimalnya pengawasan dan pengendalian sumber daya perikanan
		Kurangnya program pelatihan dan pendampingan
		Terbatasnya kapasitas kelembagaan kelompok
		Tingginya biaya produksi perikanan
	Rendahnya Nilai akuntabilitas dan kinerja perangkat daerah	Kurangnya Sistem Pengawasan dan Evaluasi yang Efektif
		Kompetensi dan Motivasi SDM berbasis kompetensi yang Kurang Optimal

2.2.2.1. Isu Global

Isu global merupakan dinamika lintas negara yang dapat memengaruhi kebijakan dan kondisi daerah secara langsung maupun tidak langsung. Perubahan yang terjadi dalam skala global seperti krisis iklim, instabilitas ekonomi dunia, pandemi, transformasi teknologi, hingga pengetatan standar perdagangan internasional, turut berdampak terhadap pembangunan sektor perikanan di tingkat lokal,

termasuk Kota Tarakan. Oleh karena itu, Dalam merespons isu-isu strategis global, Dinas Perikanan Kota Tarakan perlu merancang kebijakan yang adaptif, terukur, dan selaras dengan kebijakan provinsi dan nasional.

Salah satu tantangan utama adalah perubahan iklim, yang menyebabkan anomali cuaca, gelombang tinggi, naiknya muka laut, serta degradasi habitat perairan seperti mangrove dan terumbu karang. Fenomena ini berpotensi mengganggu produktivitas perikanan tangkap dan budidaya. Selain itu, gejolak ekonomi global berdampak pada ketidakstabilan harga komoditas, fluktuasi permintaan ekspor perikanan, dan menurunnya daya beli masyarakat pesisir. Kondisi tersebut menuntut Dinas Perikanan untuk memperkuat ketahanan ekonomi pelaku usaha lokal melalui diversifikasi produk dan pasar, serta penguatan kelembagaan ekonomi rakyat.

Isu strategis lain yang perlu diantisipasi adalah kemajuan teknologi digital, yang mendorong penggunaan sistem informasi dan otomasi dalam pengelolaan perikanan. Meskipun membawa peluang efisiensi, hal ini juga memerlukan kesiapan SDM dan infrastruktur. Selain itu, standar mutu internasional yang semakin ketat, termasuk tuntutan akan sertifikasi keamanan pangan dan traceability produk, menuntut peningkatan kapasitas Unit Pengolahan Ikan (UPI) skala kecil. Dalam konteks keberlanjutan, agenda global seperti SDGs, transisi energi bersih, dan ekonomi rendah karbon juga mendorong sektor perikanan untuk lebih ramah lingkungan. Dinas Perikanan Kota Tarakan perlu mulai mengintegrasikan prinsip-prinsip ini ke dalam kebijakan dan program, termasuk melalui upaya rehabilitasi mangrove, promosi konsumsi ikan bergizi, dan dukungan terhadap penggunaan energi yang efisien di sektor perikanan.

2.2.2.2. Telaah Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)

Sebagai bagian dari upaya mewujudkan harmonisasi pembangunan antara pusat, provinsi, dan daerah, Dinas Perikanan Kota Tarakan

melakukan telaah terhadap Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Telaah ini bertujuan untuk menyelaraskan arah kebijakan dan prioritas pembangunan sektor perikanan Kota Tarakan dengan sasaran strategis nasional, sekaligus memperkuat sinergi program dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Isu-isu strategis dalam Renstra KKP merupakan bagian dari agenda nasional yang tercermin dalam *Asta Cita Presiden*, dan apabila diadopsi secara tepat akan mendukung tercapainya pengelolaan perikanan yang berkelanjutan, inklusif, dan berdaya saing tinggi di tingkat lokal.

Salah satu pilar penting yang perlu diadopsi oleh Dinas Perikanan Kota Tarakan adalah pendekatan ekonomi biru (*blue economy*), yaitu pembangunan sektor perikanan yang mengedepankan produktivitas ekonomi dengan tetap menjaga keberlanjutan ekosistem laut dan pesisir. Hal ini sejalan dengan arah kebijakan nasional yang menempatkan ekonomi biru sebagai kerangka utama dalam pengembangan industri perikanan, khususnya melalui peningkatan nilai tambah produk perikanan, pemanfaatan sumber daya secara efisien, konservasi sumber daya pesisir, dan transformasi digital sektor kelautan dan perikanan.

Beberapa isu strategis dalam Renstra KKP yang relevan dan harus diselaraskan dengan konteks Kota Tarakan meliputi:

1. **Pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan** (*Asta Cita 5*), melalui konservasi, restocking, dan praktik budidaya ramah lingkungan.
2. **Peningkatan kesejahteraan nelayan, pembudidaya, dan pelaku usaha kecil** (*Asta Cita 6*), melalui pemberdayaan ekonomi lokal dan penguatan kelembagaan usaha.
3. **Pengembangan industri perikanan berbasis ekonomi biru dan peningkatan nilai tambah produk** (*Asta Cita 7*), dengan mendukung hilirisasi hasil tangkapan, industrialisasi rumput laut, dan penguatan UPI skala kecil.

4. **Penguatan sistem logistik dan tata niaga hasil perikanan** (*Asta Cita 6*), untuk efisiensi distribusi dan stabilisasi harga.
5. **Perlindungan kawasan pesisir dari degradasi dan alih fungsi lahan** (*Asta Cita 5*), termasuk pengelolaan ruang pesisir secara terpadu.
6. **Transformasi digital dan inovasi teknologi perikanan** (*Asta Cita 1 dan 3*), untuk meningkatkan efisiensi produksi dan pengelolaan data usaha.
7. **Penguatan ketahanan pangan berbasis ikan** (*Asta Cita 2*), melalui promosi konsumsi ikan, edukasi gizi, dan program GEMARIKAN.
8. **Peningkatan tata kelola dan pengawasan usaha perikanan** (*Asta Cita 4*), untuk memastikan kepatuhan, mutu, dan keberlanjutan usaha perikanan.

Dengan mengintegrasikan pendekatan **ekonomi biru** ke dalam perencanaan daerah, Dinas Perikanan Kota Tarakan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi sektor perikanan yang tidak hanya meningkatkan pendapatan masyarakat, tetapi juga menjamin keberlanjutan lingkungan dan ketahanan pangan daerah. Sinkronisasi ini menjadi dasar penting bagi perumusan program dan kegiatan strategis dinas yang responsif terhadap dinamika global, nasional, dan kebutuhan lokal.

2.2.2.3. Telaah Laporan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Periode 2025–2029

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD merupakan dokumen yang memberikan arahan pembangunan berkelanjutan melalui identifikasi isu-isu strategis di bidang lingkungan, sosial, dan ekonomi. KLHS bertujuan memastikan bahwa setiap kebijakan, program, dan kegiatan pemerintah daerah telah mempertimbangkan prinsip keberlanjutan serta sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs). Dalam konteks ini, penyusunan Renstra Dinas Perikanan Kota Tarakan perlu mengacu pada isu-isu utama yang diidentifikasi dalam KLHS RPJMD Provinsi Kalimantan Utara,

guna menjamin integrasi lintas dokumen dan arah kebijakan yang konsisten secara vertikal.

Beberapa isu strategis lingkungan yang relevan dengan urusan perikanan dan harus menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan sektor perikanan di Kota Tarakan antara lain:

1. **Ancaman IUU (Illegal, Unreported, and Unregulated) Fishing** yang berdampak pada keberlanjutan stok ikan, meskipun penanganannya berada di tingkat provinsi/pusat. Pemerintah kota tetap perlu mendukung pengawasan usaha budidaya dan pengolahan agar berizin, legal, dan ramah lingkungan.
2. **Budidaya perikanan di luar kawasan yang ditetapkan**, seperti rumput laut atau tambak di zona tidak sesuai peruntukan, menimbulkan tekanan ekologis dan sosial. Hal ini perlu direspon melalui penataan ruang pesisir yang lebih baik di tingkat kota.
3. **Kerusakan ekosistem mangrove** yang terjadi akibat konversi lahan dan aktivitas perikanan yang tidak terkendali. Kota Tarakan sebagai daerah pesisir perlu memperkuat program restorasi dan perlindungan kawasan mangrove.
4. **Pencemaran perairan pesisir akibat limbah domestik dan kegiatan usaha**, yang memengaruhi kualitas air dan hasil perikanan budidaya. Hal ini menuntut penguatan pengawasan dan edukasi pelaku usaha agar menerapkan prinsip kelestarian.
5. **Pemanfaatan sumber daya perikanan yang belum ramah lingkungan**, termasuk praktik budidaya dan pengolahan yang belum mempertimbangkan daya dukung ekosistem. Pendekatan ekonomi biru dan berbasis ekosistem menjadi penting untuk diarusutamakan.

Selain itu, isu lainnya yang berkaitan langsung dengan efektivitas program perangkat daerah antara lain:

6. **Belum optimalnya pemanfaatan potensi perikanan**, seperti rendahnya nilai tambah hasil perikanan, minimnya teknologi tepat guna, serta terbatasnya akses pasar bagi pelaku usaha

kecil. Ini menuntut peran aktif Dinas Perikanan Kota dalam peningkatan kapasitas dan fasilitasi pasar.

7. **Ancaman terhadap habitat spesies laut kritis**, meskipun sebagian besar terjadi di wilayah provinsi, tetap perlu direspons dengan peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya konservasi dan pengelolaan ekosistem secara berkelanjutan.
8. **Belum optimalnya implementasi kebijakan ekologis**, termasuk lemahnya penerapan regulasi teknis di bidang budidaya, pengolahan hasil, dan pengawasan kualitas lingkungan, yang dapat diatasi melalui peningkatan tata kelola, pelatihan, dan sistem pengawasan terpadu di tingkat kota.

Dengan mengintegrasikan isu-isu dalam KLHS ke dalam dokumen Renstra, Dinas Perikanan Kota Tarakan diharapkan mampu menyusun kebijakan dan program yang tidak hanya meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan pelaku usaha perikanan, tetapi juga mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals (SDGs)*, khususnya **TPB 14: Ekosistem Lautan**, **TPB 12: Produksi dan Konsumsi Berkelanjutan**, serta **TPB 13: Penanganan Perubahan Iklim**. Pendekatan pembangunan berkelanjutan ini penting untuk menjamin keberlanjutan sumber daya perikanan Kota Tarakan bagi generasi mendatang.

2.2.2.4. Telaah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Utara

RPJMD Provinsi Kalimantan Utara merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang memuat arah kebijakan, sasaran, dan prioritas pembangunan daerah tingkat provinsi selama lima tahun. Dalam konteks sinkronisasi kebijakan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, identifikasi isu strategis daerah yang tercantum dalam RPJMD Provinsi menjadi dasar penting bagi perangkat daerah di tingkat kota, termasuk Dinas Perikanan Kota Tarakan, dalam merumuskan kebijakan dan program strategis. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan pembangunan di

daerah berjalan searah dan saling mendukung, serta berkontribusi terhadap pencapaian visi pembangunan daerah secara menyeluruh.

Beberapa isu strategis Provinsi Kalimantan Utara yang relevan dengan tugas dan fungsi Dinas Perikanan Kota Tarakan antara lain:

1. **Transformasi menuju ekonomi hijau dan ekonomi biru**, yang mendorong pengelolaan sektor kelautan dan perikanan secara berkelanjutan, dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan pesisir. Kota Tarakan sebagai daerah kepulauan di perbatasan memiliki posisi strategis untuk mengembangkan ekonomi biru berbasis usaha perikanan tangkap, budidaya ramah lingkungan, dan pengolahan hasil yang efisien.
2. **Peningkatan produktivitas ekonomi daerah yang inklusif dan bernilai tambah**, termasuk melalui hilirisasi produk perikanan dan diversifikasi usaha. Kota Tarakan perlu memperkuat pelaku usaha kecil dan menengah dalam sektor pengolahan hasil perikanan agar mampu menghasilkan produk yang kompetitif dan berorientasi pasar.
3. **Pemerataan konektivitas dan akses terhadap layanan dasar**, termasuk distribusi hasil perikanan dan akses ke sarana produksi, infrastruktur pelabuhan perikanan, serta logistik dingin (cold chain) yang memadai.
4. **Tata kelola pemerintahan dan pengelolaan wilayah perbatasan yang efektif**, mengingat sebagian wilayah pesisir Kota Tarakan berhadapan langsung dengan kawasan perbatasan laut. Hal ini menuntut peningkatan pengawasan kegiatan usaha perikanan dan penguatan koordinasi kelembagaan lintas wilayah.
5. **Penguatan kualitas SDM dan pemberdayaan masyarakat pesisir**, melalui peningkatan kapasitas nelayan, pembudidaya, dan pelaku UPI kecil agar mampu menerapkan teknologi perikanan yang berkelanjutan, sekaligus membangun kelembagaan ekonomi lokal yang mandiri dan adaptif.

Dengan mengintegrasikan isu-isu strategis tersebut ke dalam dokumen Renstra Dinas Perikanan Kota Tarakan, maka arah kebijakan dinas akan semakin selaras dengan visi dan misi pembangunan Provinsi Kalimantan Utara 2025–2029. Integrasi ini juga menjadi landasan penting dalam mendorong pembangunan sektor perikanan yang berdaya saing, inklusif, dan berbasis keberlanjutan, sejalan dengan prinsip pembangunan rendah emisi, berkeadilan sosial, dan berwawasan lingkungan.

2.2.2.5 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tarakan terpilih menjadi acuan utama dalam perencanaan pembangunan daerah jangka menengah, termasuk dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah. Visi pembangunan Kota Tarakan Tahun 2025–2029 dirumuskan sebagai berikut:

“Tarakan Kota Jasa, Perdagangan, Perikanan Kelautan, dan Ekonomi Kreatif yang Berdaya Saing dan Maju menuju Masyarakat Sejahtera.”

Visi ini menegaskan bahwa sektor perikanan dan kelautan merupakan salah satu sektor prioritas pembangunan daerah, bersama dengan jasa, perdagangan, dan ekonomi kreatif. Empat arah pembangunan yang terkandung dalam visi tersebut meliputi:

1. Pusat Jasa, Perdagangan, Perikanan, Kelautan, dan Ekonomi Kreatif

Kota Tarakan diarahkan menjadi simpul utama layanan sektor jasa yang berkualitas, penguatan industri dan perdagangan hasil perikanan, serta pengembangan ekonomi kreatif berbasis sumber daya pesisir dan kelautan.

2. **Berdaya Saing**

Pengembangan kapasitas SDM, kelembagaan, dan inovasi diarahkan untuk meningkatkan daya saing daerah dalam menghadapi tantangan global dan regional.

3. **Maju**

Percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif melalui penguatan infrastruktur dasar, pendidikan, dan kesehatan yang berkualitas.

4. **Sejahtera**

Peningkatan kesejahteraan masyarakat dilakukan melalui perluasan akses terhadap layanan dasar dan pemerataan pendapatan masyarakat.

Salah satu **misi** kepala daerah yang relevan langsung dengan tugas dan fungsi Dinas Perikanan Kota Tarakan adalah:

“Meningkatkan pembangunan ekonomi melalui dukungan kemudahan berusaha yang berkeadilan.”

Dalam kerangka misi tersebut, Dinas Perikanan memegang peran strategis dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah, yakni:

“Meningkatnya kontribusi sektor perikanan terhadap perekonomian daerah.”

Sasaran pembangunan yang ditetapkan untuk mewujudkan tujuan tersebut adalah:

“Meningkatnya produksi sektor perikanan,”

yang kemudian dijabarkan dalam tujuan strategis Dinas Perikanan:

“Meningkatkan produksi sektor perikanan.”

Untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran tersebut, program dan kegiatan Dinas Perikanan Kota Tarakan akan difokuskan pada:

- **Peningkatan kapasitas dan produktivitas pelaku utama perikanan** (nelayan kecil, pembudidaya ikan, pengolah dan pemasar hasil perikanan),
- **Penguatan kelembagaan dan akses pasar**, serta
- **Optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya perikanan secara berkelanjutan.**

Pendekatan ini sejalan dengan misi pembangunan daerah yang menekankan pentingnya pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan, serta penguatan sektor perikanan sebagai penggerak utama ekonomi lokal berbasis wilayah pesisir dan laut.

2.2.2.6. Penentuan Isu-Isu Strategis

Penentuan isu strategis merupakan tahapan penting dalam proses perencanaan strategis perangkat daerah. Isu strategis mencerminkan tantangan nyata dan kompleks yang dihadapi, baik dari faktor internal maupun eksternal, serta berdampak signifikan terhadap pencapaian tujuan pembangunan sektor perikanan. Isu-isu ini ditetapkan dengan mempertimbangkan hasil identifikasi permasalahan, potensi lokal yang menjadi kewenangan Dinas Perikanan Kota Tarakan, serta relevansinya terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), dinamika lingkungan global, nasional, dan regional.

Meskipun kewenangan utama Dinas Perikanan Kota Tarakan secara normatif terbatas pada pengelolaan perairan umum daratan (PUD), namun pelaksanaan kewenangan pemberdayaan nelayan kecil, pembudidaya ikan kecil, serta pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan skala mikro dan kecil tetap menjadi fokus utama. Hal ini didasarkan pada kondisi faktual bahwa sebagian besar masyarakat pesisir Kota Tarakan bermata pencaharian sebagai nelayan dan pembudidaya, meskipun aktivitasnya dilakukan di perairan laut sekitar Tarakan yang secara yuridis bukan menjadi kewenangan langsung pemerintah kota.

Di sisi lain, isu-isu penting seperti fluktuasi harga hasil perikanan budidaya (terutama udang dan rumput laut), kesulitan akses BBM bersubsidi bagi nelayan kecil, hingga lemahnya kelembagaan dan SDM pelaku usaha skala kecil juga menjadi perhatian dalam penyusunan strategi pembangunan sektor perikanan ke depan. Rangkuman secara final isu-isu strategis Dinas Perikanan Kota Tarakan dalam lima tahun ke depan dapat dilihat pada table 2.12.

Tabel 2.12 Isu Strategis Dinas Perikanan Kota Tarakan

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
Perikanan tangkap oleh nelayan kecil (berdomisili di Tarakan)	Rendahnya kontribusi sektor perikanan terhadap ekonomi daerah	- Penangkapan berlebih - Budidaya tidak sesuai zonasi	Perubahan iklim, ketahanan pangan	Transformasi ekonomi biru	Restocking & konservasi ekosistem	Peningkatan kontribusi sektor perikanan melalui produksi berkelanjutan dan ekonomi biru
Perikanan budidaya (rumput laut dan udang)	Fluktuasi harga hasil budidaya terutama rumput laut dan udang	- Ketergantungan pasar luar - Tata niaga tidak stabil	Krisis harga pangan	Ketahanan pangan	Diversifikasi pasar dan pembeli	Penguatan nilai tambah dan stabilisasi harga komoditas unggulan perikanan budidaya
Pelaku usaha pengolahan & pemasaran hasil perikanan skala mikro dan kecil (UMKM)	Lemahnya daya saing dan akses pasar	- Pemanfaatan SDA kurang ramah lingkungan	Standar perdagangan ketat	Digitalisasi UMKM	Industri lokal berbasis perikanan	Peningkatan daya saing produk perikanan olahan berbasis UMKM local
Kelembagaan nelayan, pembudidaya, dan pelaku usaha perikanan kecil	Kapasitas SDM masih lemah, kelembagaan belum solid	- Kesenjangan teknologi dan literasi digital	Transformasi digital	Penguatan kelembagaan	Kolaborasi riset dan inovasi	Penguatan kapasitas kelembagaan dan SDM pelaku utama sektor perikanan
Nelayan kecil berbasis domisili Tarakan	Kesulitan akses BBM bersubsidi	- Ketimpangan akses sarana produksi	Akses energi tepat sasaran	Reformasi distribusi subsidi	Skema distribusi dan kuota	Peningkatan akses energi untuk mendukung produktivitas nelayan kecil

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan pembangunan sektor perikanan di Kota Tarakan periode 2025–2030 dirumuskan untuk mendukung pencapaian visi pembangunan daerah, khususnya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis kelautan dan perikanan yang berkelanjutan serta berdaya saing.

Sejalan dengan visi **“Tarakan Kota Jasa, Perdagangan, Perikanan Kelautan, dan Ekonomi Kreatif yang Berdaya Saing dan Maju menuju Masyarakat Sejahtera.”** serta misi **“Meningkatkan pembangunan ekonomi melalui dukungan kemudahan berusaha yang berkeadilan”**, Dinas Perikanan Kota Tarakan menetapkan dua tujuan strategis utama, yaitu:

- (1) Meningkatnya kontribusi sektor perikanan terhadap pembangunan daerah, dan
- (2) Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi perangkat daerah.

Kedua tujuan ini dijabarkan lebih lanjut ke dalam sejumlah sasaran terukur, yang disertai indikator kinerja utama, baseline tahun 2024, serta target tahunan sampai dengan 2030. Rincian tujuan, sasaran, dan indikator kinerja disajikan pada Tabel 3.1.

- 1) **Kontribusi PDRB sektor perikanan** ditetapkan pada level stabil sebesar 10,53% sepanjang periode 2025–2030. Target ini disusun berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dan dihitung dalam agregat dengan sektor pertanian dan kehutanan, sesuai klasifikasi lapangan usaha dalam PDRB Kota Tarakan. Pilihan mempertahankan kontribusi pada level stabil mencerminkan pendekatan realistis dengan mempertimbangkan daya dukung sumber daya alam serta keterkaitan subsektor perikanan dengan pertanian dan kehutanan. Fokus kebijakan diarahkan pada optimalisasi nilai tambah, efisiensi produksi, dan keberlanjutan,

sehingga meskipun persentase kontribusi stabil, dampak ekonomi tetap signifikan.

- 2) **Produksi perikanan tangkap** ditargetkan tumbuh dengan asumsi pertumbuhan moderat sebesar 2% per tahun, dari baseline 20.917 ton pada 2024 menjadi 23.556 ton pada 2030. Target ini ditetapkan dengan mempertimbangkan capaian produksi 2020–2024 yang menunjukkan pola fluktuatif namun cenderung meningkat. Penetapan proyeksi moderat mencerminkan upaya menjaga kesinambungan produksi dengan tetap memperhatikan daya dukung sumber daya ikan dan efisiensi armada tangkap.
- 3) **Produksi perikanan budidaya** diproyeksikan meningkat rata-rata 3% per tahun, dari 213.453 ton pada 2024 menjadi 254.875 ton pada 2030. Target ini disusun berdasarkan tren capaian 2020–2024 yang secara umum menunjukkan pertumbuhan meskipun fluktuatif. Fokus kebijakan diarahkan pada penguatan teknologi budidaya, diversifikasi komoditas, serta mitigasi risiko eksternal seperti penyakit ikan dan biaya pakan.
- 4) **Produksi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan** ditargetkan tumbuh rata-rata 5% per tahun, dari baseline 35.866 ton pada 2024 menjadi 48.064 ton pada 2030. Target ini memperhitungkan lonjakan signifikan produksi tahun 2024 yang menjadi momentum penting bagi hilirisasi perikanan. Dengan dukungan pada peningkatan kualitas produk, standardisasi mutu, dan akses pasar yang lebih luas, pertumbuhan 5% per tahun dinilai rasional sekaligus menantang.
- 5) **Nilai SAKIP** ditetapkan meningkat secara gradual dari baseline 67,67 pada 2024 hingga mencapai 73 pada 2030. Target disusun untuk memastikan peningkatan kualitas tata kelola secara konsisten, baik dalam aspek perencanaan, penganggaran, maupun pelaporan kinerja, sehingga mampu memperkuat akuntabilitas publik.
- 6) **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)** ditetapkan meningkat secara bertahap dengan kisaran ± 2 –3 poin per tahun, dari target 75 pada

2025 hingga 88,3 pada 2030. Penetapan target ini mengikuti standar evaluasi pelayanan publik Kementerian PANRB, dengan orientasi pada peningkatan kualitas layanan, kemudahan akses, serta kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perikanan.

3.2. Strategi dan Arah Kebijakan

3.2.1 Strategi Perangkat Daerah

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran pembangunan sektor perikanan sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Perikanan Kota Tarakan Tahun 2025–2029, telah dirumuskan strategi yang disesuaikan dengan permasalahan utama, isu strategis daerah, serta kewenangan faktual perangkat daerah. Strategi ini ditujukan untuk memastikan keterkaitan antara arah kebijakan, program, dan kegiatan yang mendukung pencapaian outcome prioritas pembangunan daerah secara terarah, terukur, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, khususnya pelaku usaha perikanan skala kecil.

.

Tabel 3. 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
3.25.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perikanan											
- Meningkatnya pertumbuhan dan stabilitas ekonomi	Meningkatnya kontribusi sektor perikanan		Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB (Persentase)	10,22	10,53	10,53	10,53	10,53	10,53	10,53	Data BPS, Target dipertahankan pada level stabil, kontribusi dihitung bersama sektor pertanian & kehutanan
		Meningkatnya produksi hasil perikanan	Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	20.917	21.335	21.761	22.197	22.641	23.094	23.556	
			Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	213.453,1	219.857	226.453	233.247	240.245	247.452	254.875	
			Produksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (Ton)	35.866	37.659	39.542	41.519	43.595	45.775	48.064	
		Meningkatnya Tata Kelola Diskan	Nilai SAKIP (Nilai)	67,67	70	70	71,5	72	72,5	73	
			Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	-	75	78	81	84	86	88,3	

Rumusan strategi dikembangkan berdasarkan hasil identifikasi tantangan sektoral yang bersumber dari isu-isu strategis global, nasional, dan regional yang relevan, serta mempertimbangkan kondisi objektif daerah, seperti keterbatasan data, sarana prasarana, kapasitas SDM, dan dukungan anggaran. Dalam konteks kewenangan, strategi ini menitikberatkan pada pemberdayaan nelayan kecil, pembudidaya skala mikro, serta pengolah dan pemasar hasil perikanan dalam lingkup Kota Tarakan.

Berikut adalah tabel 3.2 strategi Dinas Perikanan Kota Tarakan yang disusun berdasarkan identifikasi masalah, tujuan/sasaran, dan alternatif strategi yang relevan:

Tabel 3. 2 Penentuan Strategi Dinas Perikanan Kota Tarakan

No	Masalah	Tujuan/Sasaran	Rumusan Strategi
1	Produksi perikanan tangkap belum optimal	Tujuan: Meningkatkan kontribusi sektor perikanan terhadap ekonomi daerah Sasaran: Meningkatnya produksi perikanan tangkap	- Optimalisasi pemanfaatan sumber daya perairan umum darat sesuai kewenangan - Pemberdayaan nelayan kecil melalui penguatan kelembagaan dan penyediaan sarana usaha - Peningkatan akurasi dan ketersediaan data statistik tangkapan
2	Produktivitas perikanan budidaya rendah dan belum merata	Tujuan: Meningkatkan kontribusi sektor perikanan terhadap ekonomi daerah Sasaran: Meningkatnya produksi perikanan budidaya	- Perluasan akses terhadap benih, pakan, dan sarana budidaya - Penguatan kelembagaan pembudidaya ikan kecil - Penyediaan prasarana, pemantauan kesehatan ikan dan lingkungan budidaya
3	Fluktuasi harga dan terbatasnya pasar hasil perikanan	Tujuan: Meningkatkan kontribusi sektor perikanan terhadap ekonomi daerah Sasaran: Meningkatnya nilai tambah hasil perikanan	- Fasilitasi pemanfaatan sistem resi gudang dan cold storage - Kemitraan antardaerah untuk distribusi hasil perikanan - Peningkatan mutu, keamanan, dan daya saing produk skala mikro dan kecil
4	Akses pelaku usaha terhadap pembiayaan masih rendah	Tujuan: Meningkatkan kontribusi sektor perikanan terhadap ekonomi daerah Sasaran: Tersedianya	- Fasilitasi pembiayaan dan kemitraan usaha mikro - Penguatan kelembagaan ekonomi pelaku utama - Pengembangan skema usaha inklusif dan adaptif

No	Masalah	Tujuan/Sasaran	Rumusan Strategi
		dukungan pembiayaan usaha bagi pelaku skala kecil	
5	Rendahnya pengawasan pelaku usaha kecil sesuai kewenangan daerah	Tujuan: Meningkatkan kepatuhan pelaku usaha perikanan	- Penguatan sistem pelaporan dan perizinan usaha mikro - Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan rutin terhadap usaha budidaya, pengolahan, dan pemasaran
6	Keterbatasan data dan informasi perikanan yang akurat dan mutakhir	Tujuan: Meningkatkan tata kelola perencanaan berbasis data Sasaran: Tersedianya sistem data dan informasi perikanan yang andal	- Digitalisasi sistem pengumpulan data sektoral - Pembaruan dan validasi basis data per subsektor - Penguatan koordinasi lintas pemangku kepentingan
7	Kualitas SDM nelayan dan pembudidaya belum memadai	Tujuan: Meningkatkan kontribusi sektor perikanan terhadap ekonomi daerah	- Pelatihan teknis dan pendampingan berkelanjutan - Sertifikasi kompetensi pelaku utama perikanan skala kecil
8	Daya saing produk pengolahan perikanan skala kecil masih rendah	Tujuan: Meningkatkan nilai tambah produk perikanan lokal	- Pembinaan mutu, pengemasan, dan perizinan produk - Penguatan promosi dan branding produk unggulan berbasis lokalitas
9	Tata kelola kelembagaan internal belum sepenuhnya berbasis kinerja	Tujuan: Meningkatkan akuntabilitas kinerja organisasi perangkat daerah	- Penguatan perencanaan berbasis bukti (evidence-based planning) - Peningkatan kualitas pelaporan kinerja dan pengelolaan data sektoral

3.2.2 Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Arah kebijakan Perangkat Daerah merupakan penjabaran strategis dari tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Perikanan Kota Tarakan Tahun 2025–2029. Arah kebijakan ini disusun untuk menjawab tantangan dan permasalahan sektoral perikanan, serta merespons isu-isu strategis yang berkembang baik secara global, nasional, maupun daerah.

Penyusunan arah kebijakan mengacu pada Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan Pemerintah Pusat, dan secara langsung mendukung arah kebijakan dalam RPJMD Kota Tarakan,

terutama pada upaya peningkatan pertumbuhan dan stabilitas ekonomi daerah.

Fokus kebijakan diarahkan pada penguatan kapasitas nelayan kecil, pembudidaya ikan skala kecil, serta pelaku pengolahan dan pemasaran hasil perikanan skala mikro dan kecil, melalui fasilitasi sarana-prasarana, akses teknologi, pembiayaan, dan pasar. Selain itu, arah kebijakan juga menekankan pentingnya peningkatan pengawasan sesuai kewenangan daerah, penguatan sistem data dan informasi, serta peningkatan kualitas tata kelola perangkat daerah.

Dengan arah kebijakan yang tepat dan terintegrasi, Dinas Perikanan Kota Tarakan diharapkan mampu mendorong terciptanya ekonomi perikanan yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing, sebagaimana dirinci dalam Tabel 3.3 berikut.

Tabel 3. 3 Arah dan Kebijakan Perangkat Daerah

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
1	Penguatan produksi dan daya saing perikanan tangkap	Meningkatnya pertumbuhan dan stabilitas ekonomi daerah	Optimalisasi sarana produksi, alat tangkap ramah lingkungan, dan manajemen usaha nelayan kecil berbasis kelompok	Mendukung pertumbuhan ekonomi daerah
2	Pengembangan budidaya perikanan berkelanjutan		Peningkatan akses terhadap benih, pakan, sarana produksi, serta penguatan kelembagaan pembudidaya skala kecil	
3	Penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat perikanan		Fasilitasi perizinan, akses pembiayaan, pelatihan, dan sertifikasi bagi nelayan, pembudidaya, dan pelaku pengolahan	
4	Penguatan sistem pengolahan dan pemasaran hasil perikanan		Penerapan GHP, pembangunan cold storage udang windu, fasilitasi	

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
			SRG, dan penguatan jejaring pemasaran rumput laut	
5	Peningkatan pengawasan perikanan berbasis kewenangan daerah		Pemantauan dan pembinaan terhadap pembudidaya, pengolah, dan pemasar sesuai kewenangan kota, termasuk pelaporan dan perizinan	
6	Penguatan sistem informasi dan data sektoral perikanan		Pengembangan sistem informasi terintegrasi sektor tangkap, budidaya, dan pengolahan	
7	Penguatan tata kelola internal perangkat daerah	Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Penguatan sistem perencanaan dan pelaporan berbasis kinerja, peningkatan nilai SAKIP, dan pelayanan kesekretariatan	Mendorong organisasi yang adaptif, responsif, dan transparan

3.2.3 Pentahapan Renstra Perangkat Daerah

Untuk menjamin pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Perikanan Kota Tarakan Tahun 2025–2029 secara sistematis dan terukur, telah disusun tahapan implementasi program dan kegiatan selama lima tahun mendatang. Pentahapan ini disusun berdasarkan hasil pemetaan kondisi awal, kesiapan sumber daya, dan kebutuhan lapangan, serta mempertimbangkan kesinambungan antar tahun dan efektivitas pelaksanaan strategi.

Secara umum, kegiatan dasar yang bersifat pemetaan, identifikasi, dan penguatan awal telah mulai dilaksanakan pada tahun 2025 sebagai fondasi pelaksanaan Renstra. Adapun pelaksanaan penuh Renstra dirancang dalam lima tahapan tahunan yang terintegrasi. Setiap tahap dirancang untuk mengakselerasi kontribusi sektor perikanan terhadap

pembangunan ekonomi daerah melalui intervensi yang semakin komprehensif dan adaptif terhadap dinamika sektor. Rincian pentahapan tersebut disajikan pada Tabel 3.4.

Tabel 3. 4 Pentahapan Renstra Perangkat Daerah

TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
(2026)	(2027)	(2028)	(2029)	(2030)
Implementasi Awal dan Penguatan Dukungan Lapangan	Perluasan Cakupan dan Pendalaman Intervensi	Integrasi dan Peningkatan Efisiensi	Peningkatan Daya Saing dan Nilai Tambah	Konsolidasi dan Transisi Renstra
- Pelaksanaan program berdasarkan data dan peta potensi 2025. - Penyaluran bantuan sarana dan prasarana usaha perikanan skala kecil. - Pelatihan teknis dan manajerial dasar bagi pelaku usaha perikanan kecil. - Penguatan koordinasi dan monitoring pelaksanaan awal.	- Perluasan kelompok sasaran dan wilayah intervensi (nelayan, pembudidaya, pengolah/pemasar skala kecil). - Penambahan sarpras dan infrastruktur pendukung usaha. - Penguatan kelembagaan ekonomi perikanan. - Evaluasi dan perbaikan dari pelaksanaan tahap I.	- Integrasi program lintas subsektor (tangkap, budidaya, pengolahan) dengan sistem logistik dan pemasaran. - Optimalisasi pemanfaatan SRG dan cold storage. - Digitalisasi data perikanan dan pelaporan sektoral. - Penguatan sistem jaminan mutu produk.	- Perluasan akses pasar dan penguatan branding produk unggulan lokal. - Pengembangan produk inovatif dan fasilitasi sertifikasi ekspor. - Peningkatan kerja sama antardaerah dan pelaku usaha. - Dukungan promosi dan hilirisasi hasil perikanan.	- Evaluasi capaian Renstra secara menyeluruh. - Dokumentasi praktik terbaik dan model pembinaan berkelanjutan. - Konsolidasi kelembagaan dan sistem pengelolaan sektor. - Persiapan penyusunan Renstra 2031–2035.

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Program, Kegiatan, Subkegiatan Perangkat Daerah

Perumusan program, kegiatan, dan subkegiatan Dinas Perikanan Kota Tarakan Tahun 2025–2029 dilakukan untuk menjamin keterkaitan langsung antara arah kebijakan, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kota Tarakan, serta mendukung pencapaian kinerja organisasi dalam bidang perikanan tangkap, budidaya, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, serta pengawasan sumber daya perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota.

Program-program yang ditetapkan disusun dengan pendekatan *cascading*, yaitu menurunkan tujuan dan sasaran ke dalam bentuk kegiatan dan subkegiatan yang memiliki output dan outcome yang terukur. Setiap program disusun berdasarkan tugas dan fungsi yang melekat pada Dinas Perikanan, serta merujuk pada Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Selain itu, perumusan ini juga memperhatikan prioritas pembangunan daerah serta kebutuhan masyarakat pelaku usaha perikanan, baik nelayan, pembudidaya, maupun pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.

Keluaran (output) dan hasil (outcome) dari setiap subkegiatan disusun untuk memastikan kontribusi nyata terhadap peningkatan produksi, pemberdayaan pelaku usaha, peningkatan kepatuhan dan mutu, serta peningkatan kualitas pelayanan kelembagaan Dinas Perikanan. Seluruh elemen tersebut dijabarkan secara rinci dalam Tabel 4.1, yang menggambarkan keterkaitan antara NSPK dan sasaran RPJMD dengan tujuan, sasaran, outcome, output, indikator kinerja, hingga struktur program, kegiatan, dan subkegiatan.

Berdasarkan pemetaan yang diuraikan dalam Tabel 4.1, perumusan program, kegiatan, dan subkegiatan Dinas Perikanan Kota Tarakan

dilakukan secara sistematis dengan mengacu pada tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan sebelumnya. Seluruh rencana program mengacu pada *Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024* tentang perubahan kedua atas *Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021*, yang menetapkan pemutakhiran kodefikasi program dan kegiatan pembangunan daerah.

Perencanaan ini menjadi dasar dalam menentukan indikator kinerja, target capaian, serta estimasi kebutuhan anggaran atau pagu indikatif selama periode lima tahun. Dengan demikian, setiap intervensi yang dirancang bukan hanya bersifat administratif, tetapi juga diarahkan untuk menghasilkan output dan outcome yang konkret, terukur, dan berkontribusi langsung terhadap prioritas pembangunan daerah.

Seluruh unsur dalam perencanaan program tersebut dipastikan memiliki keterkaitan logis dengan isu strategis, strategi, dan arah kebijakan perangkat daerah, sehingga menjamin konsistensi, efektivitas pelaksanaan, serta efisiensi penggunaan sumber daya.

Rincian program, kegiatan, subkegiatan, berikut target kinerja dan pembiayaan indikatifnya dapat dilihat pada tabel 4.2.

Tabel 4. 1 Perumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Perikanan Kota Tarakan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
3.25.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perikanan							
Meningkatnya pertumbuhan dan stabilitas ekonomi	Meningkatnya kontribusi sektor perikanan	Meningkatnya produksi hasil perikanan			Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB (Persentase)		
					Produksi Perikanan Tangkap (Ton)		
					Produksi Perikanan Budidaya (Ton)		
					Produksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (Ton)		
		Meningkatnya Produksi perikanan tangkap			Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap (%)	3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	
					Tersedianya data dan informasi perikanan tangkap	3.25.03.2.01 - Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	
						3.25.03.2.01.0001 - Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	
					Terlaksananya pemberdayaan nelayan kecil	3.25.03.2.02 - Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	
						3.25.03.2.02 - Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil (Unit)	3.25.03.2.02 - Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha (Unit Usaha)	3.25.03.2.02 - Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya (Orang)	3.25.03.2.02.0001 - Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	
					Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya (Kelompok)	3.25.03.2.02.0002 - Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	
					Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha (Unit Usaha)	3.25.03.2.02.0003 - Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil (Unit)	3.25.03.2.02.0004 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	
			Meningkatnya Produksi perikanan budidaya		Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya (%)	3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	
				Terlaksananya pemberdayaan pembudi daya ikan	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan (Kelompok)	3.25.04.2.02 - Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	
					Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas (Kelompok)	3.25.04.2.02 - Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	
					Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya (Kelompok)	3.25.04.2.02 - Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
					Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas (Kelompok)	3.25.04.2.02.0001 - Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	
					Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan (Kelompok)	3.25.04.2.02.0002 - Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	
					Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya (Kelompok)	3.25.04.2.02.0003 - Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	
				Tersedianya data dan informasi perikanan budidaya	Dokumen hasil pelaksanaan monitoring kesehatan ikan dan lingkungan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	3.25.04.2.04 - Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	
					Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	3.25.04.2.04 - Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	
					Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat (Unit)	3.25.04.2.04 - Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	
					Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Unit)	3.25.04.2.04 - Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	
					Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Unit)	3.25.04.2.04 - Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	
					Jumlah Sarana Prasarana unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan yang tersedia (Unit)	3.25.04.2.04 - Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	
					Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	3.25.04.2.04.0001 - Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
					Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Unit)	3.25.04.2.04.0002 - Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Dokumen hasil pelaksanaan monitoring kesehatan ikan dan lingkungan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	3.25.04.2.04.0008 - Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Unit)	3.25.04.2.04.0009 - Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat (Unit)	3.25.04.2.04.0010 - Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	
					Jumlah Sarana Prasarana unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan yang tersedia (Unit)	3.25.04.2.04.0013 - Penyediaan Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan	
			Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha perikanan		Persentase peningkatan kepatuhan pelaku usaha (%)	3.25.05 - PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	
				Terlaksananya pengawasan pelaku usaha perikanan	Jumlah pelaku usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota (Pelaku Usaha)	3.25.05.2.01 - Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	
					Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota (Pelaku Usaha)	3.25.05.2.01 - Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
					Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota (Pelaku Usaha)	3.25.05.2.01 - Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	
					Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota (Pelaku Usaha)	3.25.05.2.01.0004 - Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	
					Jumlah pelaku usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota (Pelaku Usaha)	3.25.05.2.01.0006 - Pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota	
					Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota (Pelaku Usaha)	3.25.05.2.01.0007 - Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	
			Meningkatnya produksi pengolahan dan pemasaran produk perikanan		Persentase peningkatan produksi pengolahan dan pemasaran (%)	3.25.06 - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	
				Tersedianya data dan informasi pengolahan dan pemasaran	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko (Dokumen)	3.25.06.2.01 - Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	
					Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Penunjang Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (Rekomendasi)	3.25.06.2.01 - Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	
					Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Penunjang Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (Rekomendasi)	3.25.06.2.01.0003 - Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Penunjang Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
					Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko (Dokumen)	3.25.06.2.01.0005 - Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko	
				Terlaksananya pembinaan mutu dan keamanan	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko (Unit Usaha)	3.25.06.2.02 - Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	
					Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko (Unit Usaha)	3.25.06.2.02.0002 - Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	
				Terlaksananya fasilitasi bagi pelaku usaha	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi (Pelaku Usaha)	3.25.06.2.03 - Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	
					Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi (Pelaku Usaha)	3.25.06.2.03.0002 - Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
		Meningkatnya Tata Kelola Diskan			Nilai SAKIP (Nilai)		
					Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)		
			Meningkatnya penguatan		Nilai SAKIP (Nilai)	3.25.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
			internal akuntabilitas	Tersedianya dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	3.25.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	3.25.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	3.25.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	3.25.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	3.25.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	3.25.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	
				Tersedianya dokumen administrasi keuangan sesuai SAP	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	3.25.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	3.25.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	3.25.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	3.25.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
			Meningkatnya kualitas layanan kesekretariatan	Tersedianya layanan administrasi umum	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	3.25.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	3.25.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3.25.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3.25.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	3.25.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	3.25.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3.25.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3.25.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	3.25.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Terkelolanya data barang milik daerah dalam aplikasi	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	3.25.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	3.25.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
				Tersedianya layanan jasa penunjang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3.25.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3.25.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Terpeliharanya barang milik daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	3.25.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3.25.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	3.25.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3.25.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

Tabel 4. 2 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Perikanan Kota Tarakan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN					7.386.267.241		7.386.267.241		7.386.267.241		7.386.267.241		7.386.267.241	
3.25.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.026.000.000		5.026.000.000		5.026.000.000		5.026.000.000		5.026.000.000	
Meningkatnya penguatan internal akuntabilitas	Nilai SAKIP (Nilai)	70	70	70	4.594.308.781	70	4.594.308.781	70	4.594.308.781	70	4.594.308.781	70	4.594.308.781	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
Meningkatnya kualitas layanan kesekretariatan	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	88	88,1	88,3	431.691.219	88,3	431.691.219	88,3	431.691.219	88,3	431.691.219	88,3	431.691.219	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP					940.691.400		940.691.400		940.691.400		940.691.400		940.691.400	
Meningkatnya Produksi perikanan tangkap	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap (%)	20.917	4	4	940.691.400	4	940.691.400	4	940.691.400	4	940.691.400	4	940.691.400	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA					892.151.433		892.151.433		892.151.433		892.151.433		892.151.433	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya Produksi perikanan budidaya	Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya (%)	213.453	3	3	892.151.433	3	892.151.433	3	892.151.433	3	892.151.433	3	892.151.433	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
3.25.05 - PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN					75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000	
Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha perikanan	Persentase peningkatan kepatuhan pelaku usaha (%)	70	5	5	75.000.000	5	75.000.000	5	75.000.000	5	75.000.000	5	75.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
3.25.06 - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN					425.424.408		452.424.408		452.424.408		452.424.408		452.424.408	
Meningkatnya produksi pengolahan dan pemasaran produk perikanan	Persentase peningkatan produksi pengolahan dan pemasaran (%)	35.866	5	5	425.424.408	5	425.424.408	5	425.424.408	5	425.424.408	5	425.424.408	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
TOTAL KESELURUHAN					7.386.267.241,00		7.386.267.241,00		7.386.267.241,00		7.386.267.241,00		7.386.267.241,00	

Setelah penetapan program prioritas melalui Dokumen RPJMD serta perumusan kegiatan dan subkegiatan dalam Dokumen Renstra, tahapan selanjutnya adalah melakukan seleksi terhadap kegiatan dan subkegiatan yang secara langsung mendukung pencapaian program prioritas dimaksud. Pemilihan ini dilakukan secara cermat dengan memperhatikan keselarasan antara program prioritas dan arah pembangunan daerah, efektivitas pemanfaatan sumber daya yang tersedia, serta kapasitas Dinas Perikanan Kota Tarakan dalam melaksanakan kegiatan secara optimal. Dengan pendekatan tersebut, diharapkan kegiatan dan subkegiatan yang terpilih mampu memberikan dampak nyata dalam mendorong pencapaian sasaran dan tujuan strategis perangkat daerah secara terukur, serta berkontribusi signifikan terhadap peningkatan outcome pembangunan sektor perikanan di Kota Tarakan. Untuk lebih jelasnya, rincian subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah dapat dilihat pada Tabel 4.3.

Tabel 4. 3 Sub Kegiatan Prioritas

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
3.25.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perikanan				
1.	3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Meningkatnya Produksi perikanan tangkap	3.25.03.2.02 - Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			3.25.03.2.02.0001 - Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	
			3.25.03.2.02.0002 - Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	
			3.25.03.2.02.0004 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	
2.	3.25.05 - PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha perikanan	3.25.05.2.01 - Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	
			3.25.05.2.01.0004 - Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	
			3.25.05.2.01.0006 - Pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota	
			3.25.05.2.01.0007 - Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha	

			pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	
--	--	--	--	--

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Dinas Perikanan Kota Tarakan dievaluasi melalui serangkaian indikator kinerja yang mencerminkan pencapaian atas pelaksanaan tugas, fungsi, serta kewenangan yang dimiliki. Indikator-indikator tersebut disusun untuk mendukung proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pembangunan secara terarah dan sistematis.

Indikator kinerja ini terbagi ke dalam dua kategori utama, yaitu *Indikator Kinerja Utama* (IKU) yang merepresentasikan capaian strategis jangka menengah perangkat daerah, serta *Indikator Kinerja Kegiatan* (IKK) yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan. Keduanya memiliki peran penting dalam menjamin konsistensi antara rencana dan pelaksanaan, sekaligus memastikan kontribusi nyata Dinas Perikanan terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD.

4.2.1. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perikanan Kota Tarakan dirumuskan sebagai instrumen untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan strategis perangkat daerah dalam periode 2025–2030. IKU ini mencerminkan keterkaitan antara peningkatan kontribusi sektor perikanan terhadap perekonomian daerah, produktivitas subsektor, serta penguatan tata kelola organisasi.

Secara umum, IKU disusun dengan mengacu pada evaluasi capaian periode 2020–2024, proyeksi potensi subsektor, serta standar evaluasi kinerja pemerintah (KemenPANRB dan BPS). Dengan pendekatan ini, target yang ditetapkan diharapkan tidak hanya realistis, tetapi juga mampu mendorong penguatan daya saing sektor perikanan secara berkelanjutan.

Penjabaran Indikator Kinerja Utama

1. Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB

Target kontribusi ditetapkan stabil pada level **10,53%** sepanjang periode 2025–2030. Angka ini dihitung bersama subsektor pertanian dan kehutanan berdasarkan data BPS. Stabilitas target mencerminkan bahwa meskipun kontribusi persentase tidak bertambah, fokus pembangunan diarahkan pada peningkatan kualitas, nilai tambah, serta keberlanjutan sektor perikanan agar tetap menjadi penopang struktur ekonomi daerah.

2. Produksi Perikanan Tangkap

Dari baseline 2024 sebesar **20.917 ton**, target ditetapkan tumbuh moderat 2% per tahun hingga mencapai **23.556 ton** pada 2030. Penetapan target ini mempertimbangkan capaian produksi 2020–2024 yang menunjukkan tren fluktuatif namun cenderung meningkat. Dengan asumsi pertumbuhan moderat, kebijakan diarahkan pada peningkatan kapasitas sarana dan prasarana tangkap, produksi, serta penguatan tata kelola berbasis prinsip keberlanjutan.

3. Produksi Perikanan Budidaya

Baseline tahun 2024 sebesar **213.453 ton** dijadikan acuan untuk menetapkan proyeksi pertumbuhan rata-rata 3% per tahun, sehingga pada tahun 2030 produksi diperkirakan mencapai **254.875 ton**. Target ini mempertimbangkan tren capaian 2020–2024 yang meski fluktuatif tetap menunjukkan pertumbuhan positif. Fokus kebijakan diarahkan pada diversifikasi komoditas unggulan, peningkatan sarana dan prasarana budidaya ikan, pemanfaatan teknologi ramah lingkungan, serta peningkatan kapasitas pembudi daya kecil.

4. Produksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Dari baseline 2024 sebesar **35.866 ton**, ditargetkan tumbuh 5% per tahun hingga mencapai **48.064 ton** pada 2030. Proyeksi ini memperhitungkan lonjakan signifikan capaian 2024 sebagai momentum hilirisasi perikanan. Arah kebijakan meliputi peningkatan mutu produk, standardisasi dan sertifikasi, penguatan sarana dan prasarana, kelembagaan pelaku usaha, serta perluasan akses pasar domestik dan ekspor.

5. **Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)**

Nilai SAKIP ditetapkan meningkat secara bertahap dari baseline 67,67 pada 2024 menjadi **73** pada 2030, dengan capaian minimal predikat “B” (nilai ≥ 70). Target ini menunjukkan komitmen penguatan tata kelola organisasi melalui perencanaan yang lebih terukur, integrasi penganggaran, dan pelaporan kinerja yang transparan.

6. **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**

IKM ditetapkan meningkat dari target awal **75 pada 2025** hingga mencapai **88,3 pada 2030**. Kenaikan dilakukan secara bertahap sekitar $\pm 2-3$ poin per tahun sesuai standar evaluasi KemenPANRB. Indikator ini mencerminkan peningkatan kualitas layanan publik, terutama kepada pelaku usaha perikanan kecil dan mikro, melalui penyederhanaan prosedur, peningkatan responsivitas, dan penyediaan sarana pelayanan yang lebih baik.

Seluruh indikator kinerja utama saling terkait dan memperkuat pencapaian tujuan strategis Dinas Perikanan Kota Tarakan. Stabilitas kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB dipadukan dengan peningkatan produksi subsektor dan penguatan tata kelola organisasi akan menjadi fondasi penting dalam membangun sektor perikanan yang berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan.

Untuk rincian lebih lanjut mengenai target capaian tahunan, dapat dilihat pada Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perikanan Kota Tarakan.

Tabel 4. 4 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perikanan

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	3.25.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perikanan									
2.	Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB	Persentase	10,22	10,53	10,53	10,53	10,53	10,53	10,53	Data BPS, Target dipertahankan pada level stabil, kontribusi dihitung bersama sektor pertanian & kehutanan
3.	Produksi Perikanan Tangkap	Ton	20.917	21.335	21.761	22.197	22.641	23.094	23.556	Target dihitung dengan asumsi pertumbuhan moderat 2% per tahun
4.	Produksi Perikanan Budidaya	Ton	213.453,1	219.857	226.453	233.247	240.245	247.452	254.875	Target ditetapkan dengan proyeksi pertumbuhan 3% per tahun
5.	Produksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Ton	35.866	37.659	39.542	41.519	43.595	45.775	48.064	Target disusun berdasarkan proyeksi pertumbuhan rata-rata 5% per tahun
6.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	-	75	78	81	84	86	88,3	Target peningkatan IKM dilakukan secara bertahap ±2–3 poin per tahun, sesuai standar evaluasi KemenPANRB.
7.	Nilai SAKIP	Nilai	67,67	70	70	71,5	72	72,5	73	Target disusun untuk memastikan peningkatan kualitas tata kelola secara gradual dan konsisten.

4.2.2. Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Dinas Perikanan Kota Tarakan merupakan instrumen pengukuran teknis yang digunakan untuk mengevaluasi efektivitas pelaksanaan program dan subkegiatan secara operasional. IKK menjadi jembatan antara capaian kegiatan lapangan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU), sehingga hasilnya dapat

menggambarkan sejauh mana kegiatan perangkat daerah berkontribusi terhadap pencapaian sasaran strategis sektor perikanan.

Penyusunan IKK ini berlandaskan pada evaluasi capaian periode 2020–2024 dan proyeksi pertumbuhan subsektor perikanan, dengan mempertimbangkan potensi sumber daya, kapasitas pelaku usaha, serta arah kebijakan pembangunan perikanan berkelanjutan.

Penjabaran Indikator Kinerja Kegiatan

1. Produksi Perikanan Tangkap

Target produksi perikanan tangkap ditetapkan meningkat rata-rata 2% per tahun (growth rate). Dengan baseline 2024 sebagai titik acuan, target tahun 2025 sebesar 102%, kemudian meningkat secara konsisten hingga mencapai 112,62% pada tahun 2030. Proyeksi pertumbuhan moderat ini memperhitungkan fluktuasi capaian 2020–2024, sehingga fokus kegiatan diarahkan pada stabilisasi produksi melalui pemberdayaan nelayan kecil, penyediaan sarana dan prasarana penangkapan, serta peningkatan kapasitas kelembagaan nelayan.

2. Produksi Perikanan Budidaya

Target produksi perikanan budidaya disusun dengan proyeksi pertumbuhan rata-rata 3% per tahun. Baseline 2024 dijadikan acuan untuk mencapai 103% pada 2025, lalu meningkat secara progresif hingga 119,41% pada tahun 2030. Penetapan target ini memperhitungkan tren capaian historis yang cenderung fluktuatif namun tumbuh positif. Kebijakan diarahkan pada penguatan sistem budidaya berkelanjutan, peningkatan akses sarana produksi, serta pengendalian risiko melalui manajemen kesehatan ikan dan kualitas lingkungan.

IKK yang ditetapkan menunjukkan adanya orientasi pada pertumbuhan terukur yang selaras dengan target IKU. Dengan

pertumbuhan moderat pada perikanan tangkap (2% per tahun) dan lebih progresif pada perikanan budidaya (3% per tahun), kegiatan Dinas Perikanan diarahkan tidak hanya untuk mengejar peningkatan volume produksi, tetapi juga memastikan keberlanjutan sumber daya, efisiensi usaha, dan pemberdayaan pelaku usaha kecil.

Analisis Risiko dan Tantangan Pencapaian IKK

Meskipun target indikator kinerja kegiatan telah dirumuskan secara moderat dan berbasis data historis, terdapat sejumlah risiko dan tantangan yang berpotensi mempengaruhi pencapaiannya, antara lain:

1. Faktor Alam dan Cuaca Ekstrem

Produksi perikanan tangkap sangat dipengaruhi kondisi alam. Cuaca ekstrem, perubahan pola musim, dan fenomena iklim global (misalnya El Niño dan La Niña) dapat menyebabkan penurunan hasil tangkapan. Hal ini menuntut strategi mitigasi seperti penguatan sistem informasi cuaca bagi nelayan dan diversifikasi usaha.

2. Ketersediaan Sumber Daya Ikan

Overfishing atau eksploitasi berlebihan dapat mengancam keberlanjutan produksi perikanan tangkap. Tantangan ini harus diantisipasi melalui pengelolaan berbasis kuota, penegakan regulasi, serta penerapan prinsip keberlanjutan.

3. Biaya Produksi dan Pakan Budidaya

Pada subsektor perikanan budidaya, fluktuasi harga pakan yang cenderung meningkat menjadi kendala utama. Tingginya biaya operasional dapat menekan margin keuntungan pembudi daya kecil. Diperlukan inovasi pakan alternatif, efisiensi manajemen usaha, serta dukungan subsidi selektif.

4. Penyakit Ikan dan Kualitas Lingkungan

Produksi budidaya juga rentan terhadap wabah penyakit ikan serta penurunan kualitas lingkungan akibat limbah atau

perubahan ekosistem. Hal ini mengharuskan adanya sistem pengawasan kesehatan ikan yang terintegrasi dan penerapan teknologi budidaya ramah lingkungan.

5. **Akses Pasar dan Rantai Pasok**

Pada subsektor pengolahan dan pemasaran, tantangan terletak pada keterbatasan akses pasar, fluktuasi permintaan, serta ketidakstabilan harga jual produk. Diperlukan strategi penguatan kelembagaan usaha mikro, standardisasi mutu produk, serta perluasan jejaring distribusi baik domestik maupun ekspor.

6. **Kapasitas SDM dan Kelembagaan**

Keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, baik nelayan maupun pembudi daya, dapat memperlambat adopsi teknologi baru. Di sisi lain, kelembagaan nelayan dan kelompok usaha perikanan masih memerlukan pendampingan untuk meningkatkan profesionalisme dan daya saing.

Risiko-risiko di atas menegaskan pentingnya dukungan kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada pencapaian angka target, tetapi juga pada daya tahan sektor perikanan terhadap ketidakpastian eksternal. Dengan mitigasi yang tepat, target IKK yang bersifat moderat-progresif dapat tercapai sekaligus menjaga keberlanjutan pembangunan perikanan di Kota Tarakan.

Rincian target tahunan IKK dapat dilihat pada Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Dinas Perikanan Kota Tarakan.

Tabel 4. 5 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Perikanan Kota Tarakan

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN										
2.	Produksi Perikanan Tangkap	positif	%	100	102	104,04	106,12	108,24	110,41	112,62	Target meningkat rata-rata 2% per tahun (growth rate)
3.	Produksi Perikanan Budidaya	positif	%	100	103	106,09	109,27	112,55	115,93	119,41	Target meningkat rata-rata 3% per tahun (growth rate)

- Catatan Teknis:
- **Baseline tahun 2024 ditetapkan sebesar 100** sebagai tahun dasar (base year) untuk memudahkan penghitungan laju pertumbuhan.
 - Nilai persentase pada 2025–2030 menunjukkan indeks pertumbuhan relatif terhadap baseline (2024 = 100).
 - Data riil produksi (ton) yang menjadi acuan baseline berasal dari **Dinas Perikanan Kota Tarakan**.

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan Kota Tarakan Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah perangkat daerah yang berfungsi sebagai pedoman operasional dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perikanan. Dokumen ini memuat arah kebijakan, strategi, tujuan, sasaran, indikator kinerja, serta program dan kegiatan yang dirancang untuk mendukung pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tarakan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Tarakan Tahun 2025–2029.

Renstra ini disusun dengan pendekatan teknokratik berbasis data, selaras dengan prinsip perencanaan pembangunan nasional dan daerah, serta memperhatikan karakteristik lokal. Penyusunan juga mengedepankan sinergi antara Dinas Perikanan dengan pemangku kepentingan di tingkat kota, provinsi, maupun pusat. Dengan demikian, Renstra diharapkan dapat meningkatkan kontribusi sektor perikanan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, dokumen ini dirancang untuk memperkuat pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan Dinas Perikanan Kota Tarakan sesuai ketentuan regulasi, khususnya dalam mendukung penguatan kapasitas nelayan kecil, pembudi daya ikan kecil, serta pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan skala mikro dan kecil. Melalui Renstra ini, diharapkan pelaksanaan pembangunan perikanan berjalan lebih terarah, terukur, sinergis, dan berkelanjutan.

5.2. Kaidah Pelaksanaan

Pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Perikanan Kota Tarakan Tahun 2025–2029 berlandaskan prinsip transparansi, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan keberlanjutan. Kaidah pelaksanaan disusun untuk memastikan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya.

Kaidah utama dalam pelaksanaan dokumen ini adalah sebagai berikut:

1. Seluruh program, kegiatan, dan subkegiatan mengacu pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJMD Kota Tarakan Tahun 2025–2029, serta memperhatikan kesinambungan dengan arah pembangunan jangka panjang (RPJPD).
2. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dilakukan dengan mengacu pada indikator dan target kinerja dalam Renstra, guna menjamin keterpaduan antara input, output, dan outcome pembangunan.
3. Pelaksanaan kegiatan lintas sektor dilakukan secara kolaboratif dengan perangkat daerah dan mitra terkait, untuk memperkuat sinergi, mencegah tumpang tindih, dan memaksimalkan capaian hasil.
4. Pengambilan keputusan dalam implementasi Renstra wajib berbasis data yang valid, mutakhir, dan terverifikasi. Evaluasi kinerja dilaksanakan secara periodik untuk mendorong perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*).
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan, struktur organisasi, atau nomenklatur sesuai regulasi terbaru, maka Renstra ini dapat dilakukan penyesuaian sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip dasar perencanaan pembangunan.

5.3. Pengendalian dan Evaluasi

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Perikanan Kota Tarakan dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan berjalan sesuai rencana serta mendukung pencapaian tujuan, sasaran, dan indikator kinerja.

- **Pengendalian** dilaksanakan secara berjenjang melalui mekanisme pemantauan dan pelaporan capaian kinerja oleh unit pelaksana teknis maupun perangkat daerah terkait.

- **Evaluasi** dilakukan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun melalui evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Renja Dinas. Evaluasi tengah periode dan evaluasi akhir periode digunakan untuk mengukur efektivitas pelaksanaan, menganalisis hambatan, serta menyusun rekomendasi perbaikan kebijakan.

Apabila terdapat perubahan ketentuan regulasi mengenai sistem pengendalian dan evaluasi Renstra, maka pelaksanaannya akan menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tarakan, September 2025
Kepala Dinas Perikanan
Kota Tarakan



Drs. Ardiansyah
NIP. 196707151986091001